



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI VII DPR RI DENGAN DIRJEN
MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI, DIRJEN ILMATE KEMENTERIAN
PERINDUSTRIAN RI, DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM DENGAN
KETUA UMUM ASOSIASI INDUSTRI TIMAH INDONESIA (AITI) DAN
KETUA UMUM ASOSIASI EKSPORTIR TIMAH INDONESIA (AETI).**

Tahun Sidang	:	2022-2023
Masa Persidangan	:	III
Rapat ke-	:	
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, Tanggal	:	Rabu, 1 Februari 2023
Waktu	:	Pukul 13.55 WIB s.d.16.36 WIB.
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara 1, Jakarta
Ketua Rapat	:	H. Eddy Soeparno, S.H, M.H./F-PAN/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI.
Sekretaris Rapat	:	Dra. Nanik Herry Murti/ Kabagset. Komisi VII DPR RI
Acara	:	1. Realisasi RKB Pertimahan; 2. Hilirisasi Timah; 3. Lain-lain
Hadir	:	28 orang Anggota hadir dari 52 orang Anggota Komisi VII DPR RI dengan rincian sebagai berikut:

A. Anggota DPR RI:

PIMPINAN :

1. Maman Abdurrahman, S.T./F-Golkar/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI
2. H. Eddy Soeparno, S.H, M.H./F-PAN/Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

**1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN:**

3 orang anggota dari 10 anggota:

1. H. Nasyirul Falah Amru, S.E.
2. H. Andi Ridwan Wittiri, S.H.
3. Bambang DH

2. FRAKSI PARTAI GOLKAR:

5 orang anggota dari 7 anggota:

1. Drs. Mukhtarudin
2. Ir. Lamhot Sinaga
3. Bambang Hermanto, S.E.
4. Dyah Roro Esti Widya Putri, BA, M.Sc.
5. Bambang Patijaya, S.E., M.M.

3. FRAKSI PARTAI GERINDRA:

2 orang anggota dari 5 anggota:

1. Dr. Ramson Siagian
2. Katherine A. Oendoen

4. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT:

4 orang anggota dari 5 anggota:

1. Ina Elisabeth Kobak, S.T.
2. Arkanata Arkam, S.T., B.E (Hons), M.Eng.Sc.
3. Rico Sia
4. H. Rudi Hartono Bangun, S.E., MAP.

5. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

4 orang anggota dari 5 anggota:

1. H. Syaikhul Islam, Lc.M.Sosio.
2. H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si.
3. Hj. Ratna Juwita Sari, S.E, M.M.
4. H. Marwan Ja'far

6. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

4 orang anggota dari 5 anggota:

1. Sartono Hutomo.
2. Muhammad Nasir
3. Rusda Mahmud
4. Drs. Hendrik H. Sitompul, M.M.

7. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

3 orang anggota dari 5 anggota:

1. Ir. H. Tifatul Sembiring
2. Dr. H. Mulyanto, M.Eng.
3. H. Nurhasan Zaidi, S.Sos.I.

8. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

1 orang anggota dari 4 anggota:

1. H. Asman Abnur, S.E., M.Si.

9. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

0 orang anggota dari 1 anggota:

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. Ridwan Djamaludiin (Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI)
2. Taufiek Bawazier (Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian ESDM RI)
3. Eka Mulya Putra (Ketua Harian AETI)
4. Ismiryadi (Ketua AITI)
5. Harwendro Aditya Dewanto (Wakil Ketua Umum AETI)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ibu-Bapak kita bisa mulai ya, sudah jam 2 memang tadi agak terlambat dari apa rapat sebelumnya sehingga baru bisa memulai sekarang. Baik Ibu, Bapak kita mulai rapatnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Salam sehat untuk kita semua,

Yang kami hormati Ibu-Bapak Anggota Komisi VII DPR RI yang hadir baik fisik maupun *virtual*, termasuk juga Pimpinannya yang hadir secara *virtual*,
Yang kami hormati Dirjen Minerba ESDM beserta jajaran,
Yang kami hormati Dirjen ILMATE Kemenperin beserta jajaran,
Yang kami hormati Ketua Asosiasi Ekspor Timah Indonesia beserta jajaran,
Yang kami hormati Ketua Asosiasi Industri Timah Indonesia beserta jajaran,
serta
Seluruh hadirin yang berbahagia,

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat bertemu guna melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih atas perhatian serta kehadiran Ibu dan Bapak Anggota Komisi VII DPR RI, serta Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian RI, Ketua AETI dan Ketua AITI beserta jajarannya yang telah hadir dalam rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum baik fisik maupun *virtual* bersama Komisi VII DPR RI.

Sesuai undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat Komisi VII DPR RI, pada hari ini Komisi VII DPR RI akan melaksanakan RDP, RDPU dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dengan agenda:



1. Realisasi RKAB Pertimahan;
2. Hilirisasi timah;
3. Dan lain-lain.

Berdasarkan data dari sekretariat, Anggota Komisi VII DPR RI yang hadir hari ini berjumlah 21 Anggota dari 8 fraksi yang ada, dengan demikian kuorum sebagaimana ditentukan telah terpenuhi dan sesuai peraturan Pasal 276 ayat (1) menyatakan bahwa, setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Oleh karena itu, pimpinan meminta persetujuan Anggota Komisi VII DPR RI agar rapat ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan dan bersifat terbuka, apakah dapat disetujui?

Atas persetujuan anggota dan dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan mitra kami nyatakan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.35 WIB)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Sebelum dilanjutkan rapat ini, kami mintakan persetujuan Ibu-Bapak Anggota Komisi VII DPR RI bahwa rapat ini selesai pada pukul kurang lebih pukul 16 atau 2 jam setelah rapat ini dimulai, apakah dapat disetujui? Setuju ya baik.

**(RAPAT:SETUJU)
(KETOK PALU 1 KALI)**

Ibu-Bapak yang kami muliakan,

Hari ini kita kedatangan kedua dirjen termasuk juga AITI, asosiasi di bidang pertimahan yang ingin memberikan masukan, gambaran kepada kita tentang berbagi permasalahan dan isu yang memang perlu kita bahas secara bersama-sama di dalam RDP, RDPU hari ini.

Saat ini beberapa IUP dan IUPK mengalami kendala dikarenakan proses persetujuan RKAB yang berlarut-larut. Sebagai contoh di sektor bauksit misalnya terdapat *smelter* bauksit PT Bintang Alumina Indonesia yang terancam *stop* produksi karena kan suplai bahan baku bauksit dari pemilik IUP, IUPK terhambat karena belum mendapatkan persetujuan RKAB.

Nah, banyak yang ingin kita bahas dan untuk menghemat waktu kami berikan kesempatan kepada Dirjen Minerba Kementerian SDM dilanjutkan oleh Dirjen ILMATE Kementerian Perindustrian, serta kemudian Ketua AETI dan Ketua AITI untuk memberikan pemaparan dan penjelasannya kami persilakan. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan kita undang *nih* Dirjen Minerba tapi yang datang, Gubernur Babel *gitu* Pak.

Silakan Pak Dirjen.



DIREKTUR JENDERAL MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Terima kasih, Pak Pimpinan.

Bismillahirrahmanirrahim,
Selamat sore,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Yang terhormat Pimpinan serta Anggota Komisi VII DPR RI,
Bapak, Ibu baik yang hadir secara fisik maupun secara *virtual*.

Terima kasih atas undangannya dan sesuai dengan undangan serta agenda yang disampaikan, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal, kami upayakan singkat, padat, Bapak Pimpinan tentang pertimahan.

Yang pertama, mengenai IUP dan persetujuan komoditas timah yang mengenai RKAB seperti yang Bapak singgung. Pada tahun 2022 yang lalu, ada 216 IUP Pak, di mana 201 di Bangka Belitung dan sisanya 15 di Kepulauan Riau. Persetujuan RKAB-nya pada tahun 2022 yang lalu ada 71 persetujuan, kemudian PT Timah dari 118 yang di Bangka Belitung dan 7 di Kepri dijadikan satu sesuai dengan Undang-Undang Minerba, kemudian ada 4 RKAB swasta di Kepri dan 71 RKAB swasta di Bangka Belitung, semua ini memang tidak semuanya berjalan dengan mulus dan cepat karena beberapa hal yang akan saya laporkan pada *slide* berikutnya.

Namun pada tahun 2023 ada tambahan 4 IUP Bapak-Bapak di Bangka Belitung, sehingga semula 201 menjadi 205, tambahan ini adalah dari IUP swasta menjadi 87 timah tetap 118. Jadi pada tahun 2023 ini bertambah 4 IUP PT Timah di Bangka Belitung.

Slide berikutnya ini adalah permohonan RKAB-nya. *Slide* berikutnya, tolong *slide* berikutnya ini mengenai permohonan RKAB-nya.

Pada tahun 2000, untuk tahun 2023 komoditas timah permohonan RKAB-nya ada 98 Bapak Pimpinan, Bapak-Ibu Anggota yang sudah disetujui baru 18 Pak, *nah* sedang evaluasi ada 11 dan sudah evaluasi 87. Dari 87 yang sudah dievaluasi itu ada 42 yang dikembalikan untuk perbaikan, kemudian dalam proses evaluasi berikut tahap perbaikan 15 dan proses persetujuan 12.

Jadi kalau kita lihat angka-angka ini memang dari permohonan yang 98 menjadi yang disetujui memang jauh bedanya, beberapa hal yang terjadi ketika ini menjadi terlambat yang pertama adalah teknis Pak, ini sistem kami sempat diserang oleh *hacker* terjadi cukup lama pada bulan Desember selama 10 hari sistem tidak bisa berfungsi, kemudian pada awal Januari satu minggu dan minggu ketiga Januari hingga saat ini, itu ada kendala teknis di sistem kami sehingga sebagian dikerjakan secara manual.



Namun di luar itu, karena kendala teknis ini bukan salah perusahaan kami pun membuka waktu lebih dari batas yang ditentukan, sehingga permohonan yang disampaikan melebihi batas waktu tetap kami proses.

Beberapa kendala atau alasan mengapa tidak disetujui biasanya administratif sifatnya Bapak, Ibu sekalian. Pertama, data pengurus perusahaan sering tidak sama antara yang ada **antara yang ada** di MODI dengan yang disampaikan dalam RKAB. Kemudian masalah soal izin, izin lingkungan, kemudian data sumber daya yang tidak diverifikasi oleh *competent person* yang sekarang menjadi syarat, rencana produksi tidak sesuai, habis masa berlaku, serta kelengkapan dokumen pendukung.

Secara prinsip, kami menerapkan semangat untuk memandu perusahaan-perusahaan yang terkendala. Jadi kalau ada yang terkendala biasanya kami pandu untuk menyelesaikannya. Dengan demikian nanti kedua belah pihak mendapat manfaat, perusahaan dapat melakukan kegiatannya, negara pun mendapat porsinya, itu mengenai RKAB 2023.

Kemudian Bapak Pimpinan, serta Bapak, Ibu sekalian, mengenai hilirisasi timah, *slide* berikutnya.

Ini adalah data umum Bapak, Ibu. Sumber daya kita 2,4 juta, cadangan kita 2,17 juta adalah produsen kedua dan pada tahun 2023 IUP ada 220 tadi saya sampaikan dengan produksi tahun 2022 sejumlah 52,893.000 ton, kemudian estimasi umur tambang kita 31 tahun.

Estimasi umur tambang ini dari yang sudah kita ketahui saat ini, namun beberapa pakar mengatakan bahwa umur tambang ini atau jumlah sumber daya yang ada masih bisa jauh lebih banyak ketika kita melakukan eksplorasi lebih dalam dan juga kita meningkatkan eksplorasi ke arah laut.

Pada tahun 2021 investasi di pertimahan mencapai 7,91 juta dolar, tahun 2022 meningkat menjadi 90,22 khususnya investasi di pengolahan dan pemurnian *smelter*. Adapun kontribusi terhadap PNBK pada tahun 2022 royalti yang diterima oleh negara sebanyak 1,14 triliun rupiah, *nah* itu adalah data umum namun produk timah yang sekarang didiskusikan untuk dihilarisasi lebih jauh, kata-kata kunci hilirisasi ini memang dapat kita diskusikan secara lebih dalam karena ada yang mengatakan dari bijih menjadi *ingot* sudah hilirisasi, namun semangat yang kami tangkap dari kenyataan perencanaan pimpinan pemerintahan bahwa kalau kita bisa menghasilkan yang lebih hilir dengan nilai tambah yang meningkat serta membuka lapangan pekerjaan itu adalah yang sedang kami antisipasi.

Secara umum Bapak Pimpinan, Bapak, Ibu sekalian, sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu kami di ESDM sudah membentuk kelompok kerja untuk mengantisipasi kebijakan larangan ekspor logam timah ini, terdiri dari kementerian dan lembaga pemerintahan, asosiasi profesi termasuk KADIN dan lain-lain kita ajak berdiskusi.

Kalau boleh berpendapat juga, ini adalah persiapan larangan ekspor yang paling serius lah yang kami siapkan sehingga nanti ada pada giliran nanti akan kami laporkan rekomendasi dari kelompok kerja ini.

Nah, penggunaan logam timah dari *pie chart* yang bisa kita lihat ini memang bermacam-macam Pak, mulai dari tim *chemical*, *tin soldier* dan lain-lain inilah yang menurut hemat kami yang dimaksud dengan hilirisasi adalah mengubah dari balok timah yang saat ini kita *export* menjadi produk-produk ini.

Nah slide berikutnya.

Di sini bisa kita lihat adalah dari konsentrat timah hasil penambangan dan pengolahan dengan 78% SN harganya dapat diperhitungkan kurang lebih 15.500 dolar per ton SN. Dengan peleburan dan pemurnian yang sudah dilakukan pada saat ini, nilai tambahnya 1,4 kali lipat atau kurang lebih 22.000 US dolar per ton SN.

Harapan kita berikutnya atau arah umum yang sekarang kami terima adalah kita arahkan ke yang lebih kanan lagi menjadi produk-produk manufaktur, di mana untuk menjadi tin *solder* nilai tambahnya dibandingkan logam timah itu 1,1 kemudian menjadi tin *chemical* menjadi 1,75 kali lipat dan untuk *template* menjadi satu setengah kali lipat. Ini adalah angka umum yang kami pegang saat ini ketika melakukan diskusi-diskusi tentang hilirisasi timah.

Slide berikutnya.

Bapak-Ibu sekalian,

Ini adalah yang disebut oleh teman-teman dari Kemenperin Pak Dirjen, ini pohon industri, kami mengutipnya dari Kementerian Perindustrian, termasuk data mengenai timah yang diekspor dan yang kita impor.

Secara umum gambaran kita kalau timah yang kita produksi itu hanya 5% yang saat ini kita olah lebih hilir di dalam negeri sisanya kita ekspor berupa balok timah atau logam timah atau tim ingot itu. Di sini yang berwarna biru adalah yang industrinya sudah ada di dalam negeri, sedangkan yang berwarna merah adalah yang belum ada industrinya di dalam negeri.

Kalau kita lihat ke arah kanan memang bisa muncul pertanyaan, di dalam, yang terdapat ditengahnya tidak ada industrinya tapi di kanan bisa ada itu karena disub, diisi oleh produk-produk *import*. *Nah* inilah yang saya kira menjadi fokus kita sehingga kami sering banyak berdiskusi juga dengan Pak Dirjen ILMATE juga jajaran bagaimana mengisi ruang-ruang yang belum ada industri dalam negerinya itu, misalnya pada industri *foaming*, termasuk juga industri mineral ikutan timah. Ini saya kira topik besarnya yang menjadi tugas kita untuk melaksanakan apa yang menjadi pemikiran tentang hilirisasi timah lebih jauh.

Nah dalam rangka menyikapi rencana pelarangan ekspor timah ini, *slide* berikutnya, kami sudah melakukan rapat-rapat diskusi perhitungan juga

pendalaman beberapa topik. Misalnya saja kami melakukan kajian untuk aspek teknis, kemudian aspek keekonomian. Kalau bisa kita ambil contoh saja ini dari hasil kajian Pokja yang kami bentuk Bapak Pimpinan, Bapak, Ibu Anggota, misalnya untuk aspek teknis kita timah *solder* itu *apex* ya atau modal kira-kira kalau kita mau membangun diperlukan kurang lebih 20 miliar rupiah, untuk tim *chemical* 350, 300 miliar untuk tim *plate* 2,3 triliun rupiah.

Adapun waktu yang diperlukan rata-rata untuk konstruksi diperlukan waktu 2 tahun, *nah* ini adalah angka umum yang paling panjang sekarang, jadi kira-kira kalau ada pertanyaan kapan kita siap kalau industrinya kita bangun sekarang, 2 tahun lagi pabriknya siap kira-kira itu yang bisa menjadi pegangan kita saat ini.

Nah angka-angka yang lain juga sama Bapak, Ibu sekalian itu adalah penjelasan kami tentang upaya kita mengantisipasi jika larangan ekspor logam timah jadi diberlakukan dalam waktu tidak terlalu lama.

Kemudian kami juga memperhitungkan agar ketika larangan ekspor diberlakukan kita tidak bahasa sederhananya bisa membuat tapi tidak bisa menjual sehingga strategi umum yang kami pertimbangkan adalah kita berusaha merangkul atau pemain-pemain global yang sudah ada agar bersama-sama kita melakukan investasi dihilirnya timah ini.

Sebagaimana kita ketahui komoditas timah ini, *slide* berikutnya, komoditasnya diperlukan sedikit-sedikit tapi dalam banyak produk akhir Pak misalnya di komponen elektronik, di TV, handphone, komputer *gitu*, berbeda dengan proksit misalnya itu jadinya ya pot batangan aluminium *gitu*, kalau ini dia diperlukan untuk berbagai komponen elektronik dan otomotif juga namun dalam jumlah yang sedikit-sedikit sehingga kita perlu merangkul para pemain global yang sudah ada.

Mohon maaf jika data nama-nama perusahaan ini tidak perlu dipublikasikan, karena kami belum berkomunikasi langsung tapi kami mengidentifikasi saja perusahaan-perusahaan mana yang layak untuk kita ajak bekerjasama, misalnya untuk komputer komunikasi elektronik itu ada Foxconn Technology dari Taiwan ini adalah pemain besar yang akan menurut hemat kami jika dapat diajak kerjasama akan produktif, Samsung Elektronik juga demikian.

Slide berikutnya,

Ini adalah untuk *Printed Circuit Board Assembly* itu apa namanya bagian-bagian dari elektronik juga ada *MCO technology* dari Amerika, ada *Chip musk technology* di sini adalah perusahaan-perusahaan besar global yang kami identifikasi baik untuk kita ajak bekerjasama jika kita ingin melakukan industrialisasi ini dalam negeri.

Berikutnya ini juga sama Bapak, Ibu, untuk sirkuit terpadu dan komponen semikonduktor ada *power technology*, JCT group dari China, ini adalah pemain-pemain besar yang hemat kami patut kita ajak bekerjasama

sama halnya ketika kalau kita membahas industrialisasi nikel misalnya sudah banyak terjadi kita mengajak bekerjasama perusahaan pemain-pemain besar yang ada di dunia.

Slide berikutnya,

Ini adalah diskusi kami di dalam pokja Bapak-Ibu sekalian, apa sih kira-kira dampaknya atau pemikiran-pemikiran apa yang terkait dengan pelarangan ekspor logam timah ini. Yang pro kira-kira itu memang kita adalah pemasok nomor 2, artinya harus ya kita bisa menentukan *gitu* sehingga apa yang ingin kita lakukan dengan timah yang kita miliki ini sehingga kita pun bisa mengendalikan, tidak semata-mata kita ikut serta pada arus global.

Kemudian tadi yang kedua **adalah** memang ada potensi penambahan penerimaan negara yang dapat kita hasilkan jika hilirisasi **lebih hilir lagi** ini dapat kita lakukan. Adapun tantangannya atau istilahnya **...(suara tidak jelas 20.01)** memang *end-user*-nya masih sedikit Pak, tadi saya *nggak* tau umum yang kami terima adalah 5% maksimum rata-rata 3,5% **pak** sementara itu juga tadi saya sampaikan kita menggunakan timah-timah hilir ini tidak timahnya saja, namun dia adalah pendukung industri-industri elektronik, semi konduktor dan lain-lain sehingga perlu bekerja sama dengan cukup banyak pihak.

Kemudian kita juga memerlukan unsur-unsur lain selain timah yang saat ini masih banyak di *import* sehingga kita tidak bisa sendirian yang tadi saya sampaikan. Kita juga perlu waktu tadi saya gambarkan misalnya untuk penguatan kapasitas tadi minimal perlu 24 bulan *gitu*, kemudian pasar juga masih relatif kecil di dalam negeri saat ini, kemudian juga **hal-hal** yang sifatnya kebijakan atau dukungan kebijakan insentif dan lain-lain saat ini belum ada.

Nah untuk itu usulan kami, saya ingin tegaskan bahwa ini usulan dari tim kerja ya Pak belum, belum merupakan kebijakan pemerintah, baru kami laporkan kepada pimpinan level menteri, kami mengusulkan pentahapan Bapak, Ibu sekalian. Misalnya tahap pertama katakanlah dalam dua tahun pertama target kita adalah substitusi *import*, jadi selama ini produk hilir timah yang kita *import* kita substitusi dengan produk dalam negeri. Untuk itu kita upayanya adalah meningkatkan kapasitas produksi pabrik-pabrik yang sudah ada misalnya *tin solder* dan tim *chemical*.

Tahap berikutnya 3 tahun kemudian kira-kira kita akan meningkatkan lagi *template* sehingga kita bisa lagi sekali lagi secara bertahap di satu sisi kita melarang ekspornya di dalam kita perkuat kapasitas, *nah* kemudian kita mulai membatasi *import* agar terjadi keseimbangan.

Baru, pada tahap kedua kami mengusulkan untuk kita mendirikan pabrik-pabrik baru sehingga semakin banyak produk logam timah yang dapat kita olah lebih hilir di dalam negeri. *Nah* untuk itu maka mengusulkan juga perlu insentif Bapak, Ibu sekalian, karena sebagaimana kita ketahui untuk menarik investasi insentif-insentif seperti ini adalah salah satu daya saing yang kita memang tawarkan kepada calon investor agar mereka tertarik dan berminat untuk melakukan kegiatan ini di Indonesia.

Kemudian berikutnya ada juga kami berpikiran kita bisa juga melakukan pembuatan stock, *national stock panel* untuk memanfaatkan mineral-mineral ikutan, ini bisa menjadi *equipment* juga sehingga kita bisa lebih secara akumulatif nanti bisa mengumpulkan mineral-mineral ikutan secara dalam jumlah yang lebih baik.

Import produk hilir timah harus juga dibatasi, tadi saya sampaikan kalau kita melarang *export* logamnya hendaknya *import* barang jadi ya pun kita batasi agar produk yang kita hasilkan di dalam negeri dapat juga diserap. Kemudian kami juga mengusulkan untuk membangun kawasan industri khusus berbasis timah yang lebih terpadu supaya lebih efisien nanti operasinya.

Secara umum Bapak Pimpinan, Bapak, Ibu sekalian, itu adalah langkah-langkah data dan langkah-langkah yang sudah kami lakukan jika ada masukan pandangan Bapak, Ibu sekalian, nanti akan kami sempurnakan kajian kami dan jika dianggap perlu nanti kami akan sampaikan kepada pimpinan.

Demikian Bapak Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik, terima kasih Pak Dirjen, Pak Dirjen Minerba.

Kami persilakan Pak Dirjen ILMATE.

DIRJEN ILMATE KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (TAUFIEK BAWAZIER):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat siang,
Salam sejahtera,

Yang saya hormati Pimpinan Komisi VII, Bapak Eddy,
Anggota Komisi VII baik yang hadir secara fisik maupun *virtual*,
Rekan kolega saya Dirjen Minerba yang juga Gubernur Jenderal,
Teman-teman dari IT asosiasi, dan juga
Seluruh peserta rapat pada siang hari ini,

Tadi sudah lengkap Pak, karena kita tim bersama jadi tentang hilirisasi, jadi saya mau akan sampaikan ada beberapa *slide* sebetulnya, konsep besarnya adalah bagaimana membangun hilirisasi dengan konsep *value added* dengan investasi yang *smart*. Artinya memang tadi yang disampaikan Pak Dirjen Minerba, jadi mohon industri tadi bisa masuk untuk bisa di *create* industrinya di dalam negeri.

Jadi kalau kita bisa katakan bahwa timah itu adalah vitaminnya industri, jadi berbeda dengan konsep hilirisasi atau *value added* di dalam bauksit yang disitu sampai produksi hilirisasinya sampai panjang jadi bisa masuk alumina,

habis itu masuk ke dalam apa namanya produk timah aluminium turunannya hingga produk-produk jadi plat bahkan sampai untuk *food and beverage* dan sebagainya.

Di sini yang kami lihat bahwa, timah yang ada sekarang sudah ada *value added* tapi tadi dengan tim yang tadi sama Pak Dirjen Minerba kita bersama-sama untuk meningkatkan daripada hilirisasi ini, *value added* konsepnya di situ, di situ yang paling potensial yang sebenarnya masuk di dalam turunannya adalah *chemical tin* dan juga ada solder dan juga ada flip, tadi dipakai memang sedikit tapi dia berfungsi besar di dalam industri itu sendiri. Jadi mulai dari elektronik kita sudah masuk ke mobil listrik, sudah masuk ke 5G dan sebagainya.

Secara anugerah Indonesia di tadi di posisi kedua, jadi kita secara global mungkin sekitar *estimate* 300 ribu ton, nomor 1 Cina, nomor 2 Indonesia, nomor 3 itu Myanmar, nomor 4 itu Peru, nomor 4 Brazil, Bolivia dan Australia. Artinya posisi strategis ini yang harus kita mainkan di dalam konsep *supply chains global* dan tentunya kami melihat ada ceruk yang kuat di dalam *tin chemical* karena sebagai katalis di sini hampir semua produk juga menggunakan itu yang satu digunakan juga untuk *tin solder* juga untuk masuk di situ, tapi yang ke arah sana sudah ada industrinya di dalam negeri, jadi anak perusahaan dari PT Timah di Cilegon kalau *nggak* salah, itu kapasitas setahun sekitar 10.000 ton yang untuk *tin chemical* dan itu saya kira potensi besar kita masuk ke *supply chains global* karena di situ fungsinya sangat luar biasa sedikit tapi berpengaruh besar di dalam proses *chemical* di dalam sebuah turunan produk-produk yang ada, ini yang menjadi kita dorong terus dengan teman-teman Minerba, yang kedua juga *tin solder* yang ada.

Tadi betul, memang kita dipakai kecil tapi ini tergantung dengan tadi dengan UM luar negerinya, contohnya misalnya dia punya produk voltas, dia menggunakan *part-part*-nya itu sesuai yang ditunjuk dengan UM-nya jadi misalnya *part* di dalam pipa-pipa tembaga itu ditunjuk oleh UM-nya sehingga semacam soldernya juga sama, *nah* ini yang penting tugas daripada investasi tadi yang *smart* tadi untuk menarik tadi yang disampaikan Pak Dirjen Minerba seperti tadi perusahaan besar-besar untuk masuk ke Indonesia, karena dia juga bisa menjadi *hold* untuk men-*supply* yang di global jadi pabriknya dibalng Indonesia untuk mengisi tadi yang pohon industri yang kosong, ini mungkin akan kita upayakan secara bertahap tadi disampaikan.

Jadi konsepnya sekarang *value added* yang ada sekarang ini memang sudah ada tapi perlu diperdalam, ini bahasa kira-kira seperti itu dan bauksit mungkin juga sama kita juga sudah bikin *roadmap*-nya untuk proses hilirisasi bersama-sama kementerian dari Minerba, karena ini dalam konsep *...(suara tidak jelas 28.13)* memang yang *integrated* dengan tambangnya itu ada di binaan teman-teman Minerba di ESDM, yang *stand alone* itu ada di Kementerian Perindustrian.

Dan kami catat di sini udah *smelter* timahnya sendiri itu yang swasta ada 5, itu *input*-nya sampai 75.000 ton dan *output*-nya bisa mencapai kapasitasnya



41.000 ton, untuk timah itu sendiri dengan tambahan investasi baru dari kalau *nggak* salah dari Australia Ausmelt itu sampai sekitar kapasitasnya 40.000 ton.

Jadi secara *geopositioning* kita punya kekuatan industri untuk menghasilkan tadi 5 tadi dan itu sudah ditata dengan baik dan ekspornya juga sudah diatur melalui bursa tadi bursa perdagangan timah itu juga sudah diatur, artinya kita *me-minimize* daripada konsep-konsep yang tadi yang pengaturan dari *input*-nya tadi lebih tertata lebih rapi lagi sehingga waktu produknya hingga mencapai 99,9% yang sesuai standar itu juga bisa menjadi keunggulan bagi Indonesia untuk menciptakan devisa dan *revenue* buat negara.

Ini menjadi konsep pentingnya saya kira tadi sudah panjang lebar oleh Pak Dirjen Minerba, jadi saya hanya menambah itu yang ini mungkin menjadi bahan diskusi mendalam ke depan dan tentunya dengan dukungan Komisi VII untuk bersama-sama merealisasikan. Jadi konsep *supply chains* di dalam hilirisasi tadi itu, terutama untuk *tin chemical*. Saya kira itu Pak Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih, Pak Dirjen, Pak Dirjen ILMATE singkat dan jelas.

Kami lanjut ke AITI dan AETI silakan, AITI dulu Pak, AITI silakan.

KETUA ASOSIASI INDUSTRI TIMAH INDONESIA (H. ISMIRYADI):

Terima kasih.

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang terhormat pimpinan rapat bersama seluruh Anggota Komisi VII baik yang hadir secara langsung maupun *virtual*,
Bapak Dirjen Minerba sekaligus Gubernur Provinsi Bangka Belitung, karena posisi saya sekarang masyarakat Bangka Belitung bersama staf dan jajarannya,
Dirjen ILMATE bersama staf dan jajarannya.

Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Komisi VII yang sangat proaktif kepada kami terutama atas nama masyarakat Bangka Belitung yang *alhamdulillah* dikaruniai oleh Allah *saubhanahu wata'ala*, dibuminya ada sumber daya alam yang namanya pasir timah dan *alhamdulillah* itu sudah dikelola hampir ratusan tahun sampai hari ini dengan segala fluktuasi perkembangannya ada manis, ada pahit, tapi tidak seperti di Morowali Pak, tidak pernah terjadi di Marowali *alhamdulillah* dan ini kami bersyukur sekali, tapi sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Bangka Belitung.

Baik Bapak-Ibu sekalian,

Saya ingin menyampaikan pandangan dari asosiasi industri timah terhadap pengembangan produk hilir timah industri. Artinya kita harus bicara soal bagaimana awalnya, awalnya akan kita laksanakan suatu pekerjaan yang lebih bagus lagi.

Secara sederhana kami ingin sampaikan bahwa, rantai suplai untuk timah itu tidak-tidak begitu sulit untuk kita pahami sampai hari ini dari mulai tambang bijih timah, itu artinya sampai porsinya ke *tin smelter* itu adalah bidangnya Kementerian ESDM. Karena boleh saya sampaikan Pak mohon maaf kepada republik ini, antara departemen dengan departemen ini kepentingannya sangat ada Pak dan itu terjadinya di lapangan begitu kita mengeluarkan dari mulai awal perizinan sampai pelaksanaan kebijakan departemen itu ada kepentingan masing-masing, ini juga harus disikapi secara arif dan bijaksana ke depan.

Karena menyangkut masalah pertimahan sampai hilirisasi ini bukan hanya departemen ESDM saja, ada departemen perdagangan. Hari ini RKAB keluar, PE-nya keluar *nggak* bisa ekspor juga Pak, apalagi ada kejadian tadi. Kalau sistemnya di *hoax* saja sudah selesai, karena itu pernah kami alami tahun, bulan ketiga tahun 2022, sistem di bea cukai tidak bekerja, semua ekspor dari Republik Indonesia terhalangi.

Saya ingin menyampaikan itu juga Pak secara garis besar, jadi kalau hari ini ada, ada, ada wacana kita untuk berkumpul menyampaikan masukan, saya justru menambahkan harus melibatkan Departemen Perdagangan, harus melibatkan Departemen Keuangan, harus melibatkan Pemerintah Daerah, tidak cukup dua departemen ini saja karena mandatnya pasti ada Pak, karena sistem di republik ini begini, belum terakhirnya BKPN sebagai yang diperintahkan oleh negara untuk satu pintu dalam perizinannya, ini juga kendala kepada kami pengusaha.

Jadi tidak mudah kita mengundang investor dan kita berinvestasi kata Pak Dirjen sampai triliunan itu kalau semua regulasinya tidak ajek, tidak ada kepastiannya.

Saya tegaskan lagi, hari ini RKAB dikeluarkan oleh Bapak Dirjen ESDM 18 nyangkut 3 Pak, PE *nggak* bisa ekspor Pak. Artinya departemen perdagangan punya juga apa *body language* untuk menghambat juga Pak, untuk, untuk, untuk tidak apa yang seperti kita harapkan secara teoritis, ini yang terjadi.

Nah jadi saya, kami berusaha untuk memberi masukan ini rantai tentang sampai produk ingot sampai dengan (**sidik 34.28**) dan GFX, itu faktor kunci bahan baku, sumber bahan baku yang 30% sama 40% yang dibutuhkan untuk hilirisasi. Kenapa kita tidak menentukan harga ekspor kita nomor dua sebagai eksportir, karena kita bukan *trader*, karena kita **...(suara tidak jelas 34.48)**. Jadi kita produk buang lepas aja yang dibutuhkan orang, coba kita ada penyanggah,



ada gudang penyanggah, kita bertahan aja 3 bulan itu timah akan mengorganik, itu kami pernah melakukan. Kami tidak ekspor berkaitan dengan kebijakan gubernur kami pada saat itu, ...(suara tidak jelas 35.05) tapi di mana kekuatan kami untuk bertahan tidak produksi selama 3 bulan, (suara tidak jelas ... 35.15) siapa yang menyanggah.

Jadi kendala ...(suara tidak jelas 35.20) jadi masuk gudang, dia cuma jual *paper* saja dan duit mereka ada itu kata kuncinya, ...(suara tidak jelas 25.28) kita akan bisa menjadi penentu harga, ada *nggak* gudang untuk penyanggah dan duitnya siap untuk meng-*cover* produsen-produsen timah, PT.Timah maupun swasta itu kata kunci. Kalau kita mau menentukan harga, jangan kita cuman sebagai produsen saja tapi kita tidak bisa melakukan manuver untuk menentukan hasil produksi kita ini yang dibutuhkan oleh dunia tapi kita *nggak* punya kekuatan untuk itu, itu realita yang kami pantau selama 20 tahun dari mulai 2003 akhir sampai hari ini, itu saja cuma kata kuncinya.

Kalau kita ambil gudang misalnya di Bangka Belitung, *di back up* oleh pemerintah, *di back up* oleh bank-bank mananya yang tujuan pemerintah, dengan aturan regulasi yang ada, saya yakin kita bisa menjadi penentu harga selain LMB, tapi kalau kita hanya bisa mampu juga lepas sampai kapanpun kita malahan kita yang dimainkan sebagai produsen.

Hujan saja menentukan Pak, yang *nggak* menentukan kita berproduksi. Kalau tambang sekarang ini Pak Dirjen *kan* tau *nggak* ada tambang besar. ...(suara tidak jelas 36.32) yang selalu di dikatakan *illegal mining* dengan mesin dompeng, dengan mesin apalagi penyedot air kecil itu udah bisa berproduksi 5 sampai 10 kilo.

Baik Bapak-Ibu sekalian,

Saya juga ingin menyampaikan bahwa begitu lepas dari ...(suara tidak jelas 36.55) itu sudah masuk *trader* untuk *tracking coat*-nya. *Trader* ini ada LME, ada KLM, ada Toyota *user* dan lain-lainnya itu dan ini kita tidak punya kemampuan untuk bisa menahan mereka untuk tidak membeli, karena kita jual itu pintunya kita jual. Sekali lagi tadi kaitannya dengan saya bilang kata penyangga tadi. Dan yang terakhir dari antara sumber bahan baku dengan sumber kebersihan pasar industri ini sangat menentukan pasar-pasarnya. Di dalam negeri hanya 5% mungkin ...(suara tidak jelas 37.30), produk kita 60.000 ton per tahun sisanya 95% tuh siapa yang, yang, yang menampung?

Ya kita jual lepas Pak, coba ada hadir Negara, siapalah yang ditunjuk, mau MIND ID buka lagi perusahaan penyangga silakan. Harga beda-beda tipis lah *nggak* perlu lagi arsitek Pak, cukup penyangga ini saja. Arsitek itu dapat sekian persen nol koma ...(suara tidak jelas 37.58), transaksi duitnya untuk mereka sendiri dan kami pun tidak peduli dari hasil, dari hasil jual beli bursa itu.

Dan itu sudah saya teriak-teriakan 2006 orang sampai saja saya jadi Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung saya teriak juga sampai hari ini banyak ICDX dan JFX dan Tuhanlah yang tahu kemana utang itu.

Padahal 3% kewajiban kami mengikuti setiap kami masuk ke bursa itu sudah kami bayarkan, dan itu kita sangat setuju karena untuk negara dan daerah penghasil. Tetapi uang yang dari bursa itu kemana, Pak? Sudah berapa tahun.

Baik. Saya juga ingin menyampaikan sebagian pandangan satu hal saja dan beberapa hal pertama kali produksi-produksi timah kita yang 60.000 ton ini kalau ada niatan untuk hilirisasi, saya sepakat dengan disampaikan Pak Dirjen itu butuh waktu. Butuh apa, butuh waktu penyeimbangan dari mulai 60.000 ton itu sampai berkurang sampai 30% kebutuhan in-ingot untuk hilirisasi itu butuh waktu 3 sampai 5 tahun.

Kalau pembangunan pabrik itu sebentar Pak, kami dari, dari kami membangun pamor biasa, pamor manual dengan menggunakan batu **...(suara tidak jelas 39.23)** sampai sekarang ini kami bikin pamor listrik itu hanya hitungan bulan. Jadi *nggak* perlu bertahun-tahun banget lah Pak, karena kita sudah ada teknologinya kok Pak tinggal waktu saja sekarang aturnya.

Yang berikutnya kita juga perlu juga di, di apa, di menengahnya itu butuh waktu 5 sampai 10 tahun, yang terakhir jangka panjang itu ketemunya sampai hilirisasi begitu pasar-pasarnya itu butuh waktu sepuluh tahun. Tidak hari ini kita *stop* besok sudah bisa hilirisasi, itu sangat mimpi tidak tidur kalau menurut saya mohon maaf Bapak.

Kami ingin memberi masukan pertama kali masalah kebijakan. Kebijakan kita harapkan kepada pemerintah pusat untuk mendukung pengembangan hilirisasi timah secara umum adalah kepastian regulasi yang menjamin investasi untuk organisasi itu. Regulasi ini tadi disampaikan ada Departemen ESDM sebagai **...(suara tidak jelas 49.29)**, ada Departemen Industri ILMATE sebagai untuk produksi, ada Departemen Perdagangan untuk memperdagangkan produk pemerintah ini, ada Departemen Keuangan yang menanggung untuk menghitung perpajakan. Royalti PPN 11% PPH apa PPD itu yang 2% artinya 13% Pak di depan mata yang harus dihadapi oleh produsen, oh investor yang akan kita undang.

Yang berikutnya, dihapuskannya kewajiban transaksi timah murni batangan melalui Bursa Timah yang tadi saya ceritakan ICDX dengan JPX tadi *nggak* ada manfaatnya itu, dalam untuk memenuhi konsumsi industri hilir dalam negeri dan ini bukan tugasnya ESDM bukan tugasnya ILMATE, tugasnya Menteri Perdagangan untuk menilai ini Pak karena pemungutan 3% di Bursa dan 0,6% setiap transaksi itu juga beban bagi kami pengusaha. Dihapuskannya kewajiban transaksi produksi timah hilir yang akan datang melalui bursa timah untuk ekspor, itu saja.

Yang berikutnya, regulasi perdagangan pemegang ET yang sekarang kami pegang ET Timah murni ini diperbolehkan Pak untuk ke depan hilirisasi, karena ada wacana kami dengar antara ET produksi tim ingot dengan ET hilirisasi ada dua Pak. Artinya tidak bisa satu-kesatuan, artinya sekarang saya perusahaan A *nih* untuk hilirisasi saya akan bikin perusahaan B lagi, *nah* ini juga harus dipertimbangkan. Apakah tidak mungkin Pak Dirjen ILMATE

maupun Pak Dirjen ESDM. Kami dari Dirjen ESDM, ET untuk tim ingot, itu ET itu bukan **...(suara tidak jelas 42.33)**

Jadi ini juga satu kesatuan harus diperhatikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi VII untuk masalah hilirisasi Pak, jadi banyak hal yang harus kita runut satu-satu sehingga nyambung menjadi satu *connect, connector*. Hingga keluar lah gambar yang sangat bagus dan yang sangat kita sepakati bersama-sama **...(suara tidak jelas 42.56)**, ya termasuk Permenpan 53 tahun 2008.

Yang berikutnya masalah perpajakan Pak, **(reaksi 43.02)** perpajakan pertambahan nilai dalam **...(suara tidak jelas 43.10)** itu jelas diangka 11 dan 2%. Paling tinggi kita beli di dalam negeri, transaksi itu kita beli di dalam negeri. Transaksi bahan baku kita *import* paling tinggi itu 2%, dan itu terjadi di *import* **...(suara tidak jelas 43.26)**.

Slide yang import bahan low, lagi, yang 2021, import, import.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Pak Ketum AITI, tolong diringkas saja Pak ya, memberi kesempatan kepada yang lain.

KETUA ASOSIASI INDUSTRI TIMAH INDONESIA (H. ISMIRYADI):

Oke kita lanjutkan Pak, jadi skemanya saya pikir itu usulan dari kami masa perpajakan, yang kedua adalah insentif bea masuk untuk *import* mesin-mesin produksi hilir timah dalam negeri. *Nah* itu pernah kami alami Pak, kami mengajukan mesin untuk produksi hilirisasi ini cuman keringanan uang masuk saja.

Karena kemarin kami ajukan Pak 100% untuk tiga miliar jadi kalau harganya itu tiga miliar, kami **(suara tidak jelas ... 44.19)** ke negara, **...(suara tidak jelas 44.20)**, maksimal itu 25 % kami masih mampu **...(suara tidak jelas 44.27)** itu tidak akan pernah terjadi. Jadi saya pikir Departemen Keuangan sangat **...(suara tidak jelas 44.33)** akhirnya ini.

Ini adalah informasi yang kami terima dari hasil bank impor yang akan kita **(samar 44.43)** nih, kita rencanakan untuk hilirisasi ini dengan berjumlah hampir 90 juta US dolar. Ini biaya masuknya cuma 2% Pak dan ini sudah pangsa dunia, *nah* kita mampu *nggak* nanti begitu kita hadir kita me **...(suara tidak jelas 45.04)**.

Republik menyetop ini untuk warna ini mengurangi minimal kita produksi, produksi yang sama dengan kualitas yang sama mampu *nggak*? Itu *kan* pertanyaan, **(bank 45.12)** ini sudah masuk Pak.

Dan dibutuhkan oleh pabrik pipa, pabrik kaca, pabrik industri lain-lainnya ini sudah masuk ke Indonesia dengan bahan baku dari tim ingot yang kita

produksi 60.000 ton tadi. Ini sebagai ilustrasi juga untuk sebagai pembanding Pak, mampu *nggak* kita bersaing dengan ini dengan aturan-aturan yang justru memperingan investasi ke depan.

Baik, saya pikir yang berikutnya untuk dukungan pemerintah daerah tadi yang saya sampaikan harus dilibatkan adalah kemudahan perizinan di tingkat daerah, Pak. IMB segala macam pembentukan kawasan industri terpadu. **...(suara tidak jelas 45.59)** segala macam, karena untuk Amdal ini kadang-kadang saya juga bingung apa manfaatnya, tapi kalau dalam acuan Pemerintah Daerah ataupun Pusat itu lain lagi.

Yang berikutnya pembentukan kawasan berikat seperti Batam, karena Bangka dengan Batam dengan Singapura saya pikir satu kesatuan yang sangat untuk **...(suara tidak jelas 46.27)**.

Jadi saya pikir itu Pak yang disampaikan selanjutnya saya juga menyampaikan mengenai cadangan timah kita tadi disampaikan oleh Pak Dirjen produksi timah kita cuma 5% selanjutnya kita pikirkan lagi.

Yang terakhir saya juga ingin menyampaikan tolong di, sama-sama nanti kita *sharing* **...(suara tidak jelas 46.47)** dan kualitas itu penting.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Interupsi dikit Pak Ketua,

Tadi data yang excel itu ada *nggak*? Di sini *nggak* ada ya?

KETUA AITI (ISMIRYADI):

Nggak ada, tadi pas, terpisah Pak saya lupa Pak.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Oh iya perlu,

KETUA ASOSIASI INDUSTRI TIMAH INDONESIA (H. ISMIRYADI):

Nanti saya *taro*, *print* lagi ke sini, ke Pak Misbah.

Iya, siap Pak.

Terima kasih Pak.

Baik saya pikir itu Pak, yang sekali lagi saya ingin menyampaikan kita juga butuh melibatkan maaf bukan mengajari Departemen Perdagangan Pak, dengan Departemen Keuangan, itu sangat penting.

Dan semuanya kami butuh berinvestasi dengan sangat aman karena hari ini kalau kita tidak aman dari jaminannya untuk keamanan ke depan saya

pikir apa yang disampaikan Pak Dirjen lima, 30 miliar sampai 1,4 triliun itu kami akan berpikir, bukan berpikir tujuh keliling Pak mungkin dua kali tujuh keliling untuk memastikan boleh atau *nggak* mereka masuk ke Republik Indonesia ke, terutama di Bangka Belitung.

Dan atas nama masyarakat Bangka Belitung kami juga menghimbau kepada Dirjen Ilmate, Dirjen ESDM maupun Perdagangan maupun Keuangan. Tolong nanti apabila ada perubahan untuk (asal 47.56) hilirisasi memang sangat dibutuhkan kami minta untuk ada di Bangka Belitung karena kami sangat mengharapkan itu untuk kelanjutan dari kehidupan setelah timah atau dan lain-lainnya.

Terima kasih atas kesempatannya, Pak.

Dan mohon maaf.

Satu lagi Pak, masalah RKAB, RKAB ini setelah paparan dari Pak Dirjen tadi memang sebenarnya RKAB ini tidak ada hal-hal yang sangat signifikan untuk masalah peraturannya sudah *oke*, aturannya sudah *oke* segala macam, cuma ada beberapa hal Pak Dirjen. Yang mungkin, mungkin Pak Dirjen agak ini di lapangan bahwa sesuai dengan, mana tadi, itu.

Masalah peraturan RKAB saya pikir itu sudah bisa kita penuhi semua dari, dari pengusaha. Cuma belakangan ini Pak itu masalah *competent person*, personal Indonesia CPI itu jadi kendala karena Pak Dirjen mengeluarkan harus CPI nya timah, sedangkan CPI ini sertifikatnya, pemilik sertifikatnya sangat sedikit Pak, sangat sedikit kami mohon juga untuk diperhatikan sehingga nanti sebagian anggota Kementerian ESDM mendorong KCMI (Komite Bersama IAGI-PERHAPI) untuk menyelenggarakan sertifikasi Pak, kami punya tenaganya untuk di, di apa, untuk dididik sehingga itu tidak menghambat ke depan.

Karena jujur aja mungkin Pak Dirjenya sampai rambutnya itu putih, saya pikir sumber daya manusia untuk menangani IUP di republik ini bukannya sedikit Pak, ribuan, sedangkan SDM yang mungkin di, dikomando Bapak ini sangat kurang sekali.

Karena apa Pak saya ngomong begitu, karena kebijakannya sudah di tarik ke Pusat. Kalau dulu masih daerah masih bisa diperbantu oleh provinsi maupun kabupaten sehingga disampaikan lagi diposisinya ke dirjen.

Sekarang saja totalitas di Dirjen, di Soepomo semua Pak. Mungkin satu pegawai Bapak saja bisa menangani 100-200 IUP POP. Seluruh Indonesia Pak bukan hanya Bangka Belitung, itu kami pahami tapi proses itu tidak juga harus kita tahu dimana celahnya Pak.

Sekarang ini yang kami alami ada di *competent person* ini pak CPI, karena hanya beberapa orang. CPI Timah dengan CPI Bauksit beda. *Nah* keluar lagi Permen dari beliau ini harus 5, sedangkan orangnya cuma 2 Pak misalnya, sertifikasi itu tidak mudah untuk mendapatkannya itu.



Mungkin itu Pak Dirjen dan sekali lagi kami juga terima kasih kepada Pak Dirjen yang sekaligus kebutuhan sebagai Gubernur Bangka Belitung sangat memahami, mohon memahami, bukan sangat memahami, harus memahami posisi Bangka Belitung. Karena masalah sumber daya alam ini sampai hari ini tidak pernah terjadi apa-apa di Bangka Belitung, kecuali 2006 kami pemerintah provinsi coba-coba melarang masyarakat menambang.

Dan kebetulan saya ada di situ 2006 itu, tapi kami tidak seperti daerah lain kami sangat *welcome* kepada siapapun dan *alhamdulillah* di masa Pandemi kemarin kami tidak terpuruk, kami tidak terpuruk. Karena perputaran duit, *sorry* perputaran ekonomi di Bangka Belitung itu 40 sampai 50% masih dipengaruhi oleh tambang timah.

Itu yang yang kami, yang, yang saya sebagai ketua asosiasi sangat peduli sekali. Maka itu saya selalu teriak kepada Pak BPJ karena beliau adalah dapil kami, Pak Tolong Pak kebetulan Bapak di Komisi VIII ini rakyat dan kebetulan juga bapak orang politik. Saya juga pernah di politik kita hitung-hitungan saja mau dua-tiga, dua-empat dan selanjutnya.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Izin, izin interupsi Ketua

Pak, ini Pak Dirjen sama Pak AITI ini bukan politis kan datang kemari?

KETUA ASOSIASI INDUSTRI TIMAH INDONESIA (H. ISMIRYADI):

Bukan

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Karena Pak Dirjennya itu PLT Gubernur, Bapak asosiasi. Saya di komisi manapun jarang ada ketemu dalam satu tempat, si pengadu dan si pemerintahnya begitu. *Nah* ini bisa satu sama Bapak datang sama-sama *gitu*. Jadi ini murni *kan* aspirasinya, *kan* Pak? *Nah* itu saya mengingatkan itu.

WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR):

Izin Pimpinan, izin Pimpinan

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya, silakan



WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI (MAMAN ABDURRAHMAN, S.T./F-GOLKAR):

Ya, makasih banyak Pimpinan

Ini saya hanya sekedar menambahkan dan mengusulkan. Tadi saya *nggak* mau ngomong tapi ini mumpung tadi bahasa RKAB, saya jadi ingin menyampaikan ide.

Sekarang ini Pak, kita ini satu Republik Indonesia selalu pengaduan ke Komisi VII itu urusan RKAB aja memang. Ini bukan hanya RKAB di timah, RKAB Bauksit, RKAB apalah segala macam, batubara, nikel, apa, luar biasa lah sudah. Jadi seakan-akan yang diurus oleh kita satu republik nih urusan minerba nih urusan RKAB aja.

Nah begini nih Pak, ini tadi saya menarik nih saya baca dasar hukumnya. Apasih dasar hukum dari RKAB tuh terkait harus satu tahun *kan*, RKAB tuh *kan* setiap setahun sekali *kan* Pak ya. Rencana Kerja Anggaran, apa tuh kepanjangannya? Rencana Kerja Anggaran dan Biaya. Kalau di migas itu POD (*Plan Of Development*), itu dibuat untuk 10 tahun, ada 15 tahun, 20 tahun.

Nah saya mengusulkan ini pimpinan, buat teman-teman Komisi VII dan ini mungkin saya rasa layak untuk dijadikan bahan debatan dan bahan diskusi kita RKAB itu jangan 1 tahun sekali Pak. RKAB itu 5 tahun sekali, jadi jangan sampai semua pelaku-pelaku usaha ini baru selesai pengurusan RKAB bulan Maret-April keluar, bulan Agustus, Agustus sudah mulai mengurus RKAB lagi.

Itu satu, yang kedua akhirnya teman-teman di ESDM khususnya minerba sibuknya hanya urusan administrasi ini aja, sedangkan ada tugas yang juga yang jauh lebih penting untuk melakukan pengawasan di lapangan. Jadi sudah saatnya ini, ini dijadikan bahan diskusi oleh kita semua, RKAB itu cukup 5 tahun sekali.

Lalu pertanyaannya, lalu kalau tiap tahun itu macam mana Pimpinan? Ya udah tiap tahun itu sifatnya laporan, laporan pengembangan ataupun aktivitas operasi dari setiap-tiap IUP itu.

Jadi jangan sampai setiap tahun itu mengulangi, harus mengulangi proses yang sama terus padahal ini *kan* sebetulnya punya hal yang sudah bisa disimplifikasi *gitu loh* Pak.

Kenapa saya usulkan begini? *Mindset*-nya harus dirubah RKAB yang dulu sebelum diterbitkan Undang-Undang Minerba nomor 3 itu, itu di berbagi tugas itu dengan provinsi dan kabupaten. Sekarang *kan* sudah *ditake over* semua di Pusat, jadi saya rasa ini salah satu usulan yang mungkin perlu dijadikan bahan diskusi buat kita semua teman-teman Komisi VII supaya apa?

Karena begini, satu republik. Saya banyak sekali dapat *viral* nih Pak, video-video segala macam, mengkritik. Peningkatan pendapatan negara kita dari sektor minerba itu meningkat Pak, tapi harus, kita harus berani juga untuk

men-*challenge* atau mengkritik diri kita sendiri bahwa peningkatan pendapatan negara dari sektor minerba itu bukan karena produktivitas kinerja ESDM. Tetapi itu lebih besar karena faktor peningkatan harga komoditas yang naik dan tinggi, batubara naik, mungkin nikel ada *up and down*, bauksit juga begitu, artinya lebih kepada harga komoditas.

Pertanyaannya kalau misalnya harga komoditas itu tidak tinggi Pak, tidak naik, peningkatan pendapatan negara kita *nggak* ada. Maka dari itu usulan untuk melakukan kajian evaluasi pengurusan RKAB yang selama ini setiap tahun dirubah menjadi 5 tahun, itu dalam rangka untuk mendorong produktivitas kinerja ESDM.

Saya pikir itu dan juga supaya temen-temen ESDM dan teman-teman pengusaha ini, pelaku penambang ini tidak setiap saat ngurusin RKAB ya dan akhirnya mohon maaf ya saya harus bilang juga. Kadang-kadang *kan* datang tuh laporan ke kita minta begini lah, begini segala macam. Ceritanya jadi macam-macam saya *kan* juga harus menjagain ESDM Pak, dibilanglah ESDM yang sana, dibilanglah minerba begini, mineral begini menghambat.

Ya sebetulnya bukan karena mau menghambat ataupun tidak menghambat, yang namanya prosedural ini harus berjalan tapi karena yang diurus tuh banyak sekali, nanti selesai nih, RKAB bulan Maret nih, (*disisir 57.25*) 2 bulan, diurus lagi RKAB bulan depan

Artinya ya kurang lebih itu saja Pak, saya hanya izin memberikan menjadi bahan diskursus dan bahan diskusi kita sama-sama, karena kalau lihat dasar hukumnya *kan* itu *kan* ada Permen ESDM Nomor 1806K bla bla itu, tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Evaluasi.

Saya pikirkan dari situ nanti itu Pak ruangnya di *window*-nya. Saya *nggak* tahu tuh, setahu saya satu tahun, dua tahun, tiga tahun itu *kan* ada di Permen. Jadi kita tidak terlalu panjang *gitu* Pak, ini cuma, ini bukan buat ini loh Pak maksud saya biar temen-temen nih kayak beliau-beliau ini apa *nggak* setengah mati beliau-beliau ini ngurusin RKAB terus, RKAB terus, entah apa, hapal lah, *visibility study*-lah, ini lah, aduh ampun kita.

Ya akhirnya jadi bukan begitu Pak Bambang, akhirnya orang jadi curiga terus *kan*, ini kita buka apa adanya loh, jadi saya bukannya apa, ini justru saya mau menjaga Institusi ESDM. Saya percaya Pak, kalau Pak Dirjen ini *nggak* ada beliau yang aneh-aneh begitu.

Nggak, nggak, ini kita ngomong apa adanya saja.

Tapi, *nah* itu tadi, uangnya sekalian banyak, udah lah banyak, IUP ribuan kalau dibuat 1 tahun sekali, *nah* kalau dibuat 5 tahun sekali *kan* itu jadi jauh lebih bagus dan teman-teman ini *plan*-nya juga bagus. Kepastian investasi perencanaan lima tahun, itu jadi jauh lebih sehat.

Ada lagi pertanyaan kepada saya, “Pak Maman, tapi kadang-kadang itu ada setelah 1 tahun atau 2 tahun berubah Pak minta dinaikkan volumenya.” Ya

itu *kan* situasi khusus, ya *monggo* diajukan seperti ini *gitu* loh maksud saya, tapi jangan setiap tahun tuh ngurus RKAB terus.

Itu saja Pak, makasih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Pimpinan, saya menambahkan sedikit Pimpinan

Apa yang disampaikan Pimpinan, Pak Maman itu benar apa adanya Pak Dirjen, saya rasa kalau kita memberikan RKAB per 5 tahun itu masih wajar Pak ya, karena kalau tiap tahun nanti capek Pak Dirjen bersama personilnya nih mengurus itu saja.

Nah yang dimaksud Pak Maman ini hanya menambahkan saja, artinya per tahun itu ada evaluasi. Banyak tahun ini, upaya 5 tahun 5 juta, setahun ini 1 juta umpamanya. Kalau *toh* mau meningkatkan tahun kedua, itu *kan* ada evaluasi Pak jadi melaporkan sambil evaluasi.

Karena sekarang ini beredar di luar itu Pak bahwa setiap kami ada RKAB harus begini, harus, oh salah saya bilang. Kamu *nggak* tahu itu Dirjen Minerba itu penjaga surga loh, malaikat penjaga surga. Sama yang ngomong ini, jadi *nggak* ada yang *gitu-gitu* saya bilang.

Oh iya betul, jadi saya bilang itu lebih bagus mungkin yang disampaikan Pak Maman tadi itu kita tindaklanjuti 5 tahun, per 1 tahun itu kita evaluasi. Sama juga *kan*, kalau *umpanya* RKAB sekarang.

Bulan Juli kalau *nggak* salah akhir itu kalau ada pengurangan atau penambahan kita mengajukan usulan. Revisi namanya, jadi mungkin per 1 tahun itu revisi.

Itu saja Pimpinan,

Terima kasih

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Terima kasih, Pak

Nanti pertanyaan-pertanyaan lain kita simpan untuk sesi pertanyaan.



Terima kasih Ketua Umum AITI,

Kita lanjut ya sekarang ke Wakil Ketua AETI, silakan Pak.

WAKIL KETUA UMUM AETI (HARWENDRO ADITYA DEWANTO):

Baik

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Shalom,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Perkenalkan nama saya Harwendro Adityo atau sering dipanggil Didit, saya Wakil Ketua Asosiasi Eksportir Timah Indonesia.

Yang saya hormati Wakil Ketua Komisi VII Bapak Eddy Soeparno dan juga Bapak Maman Abdurrahman, Kemudian Bapak-Ibu anggota Komisi VII yang hadir secara fisik maupun visual, Kemudian Bapak Dion Winarba, sekaligus Bapak PJ Gubernur yang saya cintai Bapak Ridwan Jamaludin, Kemudian Bapak Didin ILMATE, Bapak Taufiek Bawazier, dan juga teman-teman semua dari Asosiasi AITI dan juga AETI yang hadir pada sore hari ini.

Sekilas mengenai AETI, bahwa kami adalah Asosiasi Eksportir Timah Indonesia berdiri 9 Mei 2014. Kemudian kami tanggal 14 Maret 2015, kami menjadi anggota luar biasa KADIN di Indonesia.

Tujuan kami membangun kerjasama yang produktif antara pemerintah, pengusaha, pemaku, dan pemangku kepentingan. Juga tujuan kami meningkatkan nilai tambah timah Indonesia dan juga mendorong implementasi *Good Mining Practice*.

Anggota kami ada 17 anggota, ada PT Timah di situ, ada RBT juga ada di situ, dan juga saya dari Mitra Stania Prima. Sekilas mengenai *update* RKAB kami, ada anggota kami sudah 7 yang mendapat RKAB per hari ini. Kemudian sempat ada kendala mengenai sistem MODI Minerba yang *down* sehingga menghambat proses penerbitan RKAB.

Harapan kami dari Asosiasi AITI proses penerbitan RKAB bisa berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian pelaku usaha yang memperoleh pengesahan RKAB mendapatkan jaminan berusaha hingga pengunjung tahun 2023.

Kemudian mengenai kondisi penyerapan timah domestik ini juga penting Bapak karena saat ini penyerapan Ingot Timah di domestik hanya 5% dari data yang kami *input*, sehingga mengenai Hilirisasi itu sangat penting bagi republik ini, apalagi Bapak Presiden sudah mengumumkan itu di beberapa kesempatan.



Kami dari AETI sangat mendukung adanya hilirisasi ini. Tentunya semua harus didukung dengan kebijakan dari Pemerintah maupun dari Anggota DPR kita sebagai wakil kita di, wakil rakyat kita.

Kemudian berikutnya mengenai Hilirisasi tadi sudah dibahas dari Bapak Dirjen Ilmate dan juga teman-teman dari AITI, kira-kira dilanjut saja. Kami juga menangkap meningkat Pasar Timah Global hingga 2023, bahwa ada potensi di situ Pak. Di *baseline* tuh, industri *baseline* tin solder, tin plate, tin chemical di 2025 mengalami kenaikan dan juga di 2030.

Selain itu juga industri 5G juga mengalami kenaikan, industri mobil listrik lebih ada kenaikan cuman tidak begitu signifikan, dan yang terbanyak adalah dari solar, solar panel energi surya. *Nah* ini kalau kita mendorong energi yang ramah lingkungan mungkin kita bisa kembangkan industri solar di Indonesia, sehingga bisa menyerap timah di Indonesia ini lebih banyak.

Kemudian pandangan mengenai hilirisasi dan pembatasan ekspor timah tadi sudah dibahas juga oleh teman-teman mungkin secara garis besar sama, Pak. Cuman saya ada pandangan sedikit dari perusahaan kami Pak, kami sudah sampaikan juga bersama Pak Dirjen, Pak PJ Gub dikesempatan di FGD. Bahwa kami perusahaan kami siap untuk melakukan hilirisasi tahun ini, tentunya semua harus didukung juga dengan kebijakan dari pemerintah, Pak.

Saat ini lahan untuk, kami inginnya membangun pabrik hilirisasi di Bangka Belitung, cuman kendala kawasan ekonomi. *Nah* itu juga nanti mungkin jadi pertimbangan juga Pak PJ Gub ke depannya, karena tanpa itu semua hilirisasi di Bangka Belitung tidak akan berjalan Pak, nanti malah pindah ke Cilegon seperti PT Timah *gitu*.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Pimpinan izin, Pimpinan intruksi sedikit.

Izin Pak Wakil, Pak Wakil Ketua mungkin kalau bisa tadi apa yang disampaikan terkait permasalahan mungkin langsung dikasih contoh konkret sedikit supaya kami paham masalahnya apa *gitu*.

Makasih Pimpinan.

WAKIL KETUA UMUM AETI (HARWENDRO ADITYA DEWANTO):

Baik.

Mengenai Hilirisasi ini ada tiga poin yang tadi saya sebutkan. Pertama, mengenai lahan Pak di Bangka Belitung masih ada, tidak ada kawasan ekonomi industri khusus di sana, terakhir mengenai ada masalah lahan di sana.

Kemudian yang kedua mengenai pendanaan tentunya, apakah Bank Nasional *support* kita mengenai Hilirisasi ini atau kita carikan investasi di luar? Kalau misalnya kita cari dana dari luar tentunya juga untuk masuk ke Indonesia



juga butuh jalur *gitu* Pak, jalur karpet merah supaya hilirisasi ini bisa berjalan dengan baik dengan cepat.

Dan yang ketiga permasalahannya adalah teknologi Pak, sebagai contoh perusahaan kami ingin membangun hilirisasi dengan perusahaan internasional dari Itali contohnya. *Nah* tentu juga punya standarisasi sendiri apalagi kalau kita bicara mengenai industri *packaging* makanan, tentu itu sangat, sangat, sangat detail Pak. Kita harus mencontoh teknologi itu 100% dari luar karena kalau tidak sesuai standar maka itu sangat sulit untuk kita pasarkan di luar.

Contoh seperti itu Pak. *Nah* mungkin kedepannya kami minta bantuan dari Komisi VII juga Pak Dirjen, Pak Dirjen Minerba untuk ke depannya tolong hilirisasi ini diberikan karpet merah seluas-luasnya Pak, supaya kami juga kalau berinvestasi juga bisa-bisa lancar lah supaya bisa mendukung kebijakan Bapak Presiden.

Terima kasih itu paparan kami dari AETI, sebagian besar sudah disampaikan juga oleh teman-teman yang lain. Mungkin apabila ada kesalahan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Terima kasih Wakil Ketua AETI.

Baik Ibu-Bapak sekalian,

Kita saatnya sekarang melakukan pendalaman, melakukan memberikan pertanyaan dan lain-lain dan seperti biasa kita rotasi dari fraksi-fraksi. Dimulai dari Fraksi PDI Perjuangan kami persilakan.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Makasih, Pimpinan.

Saya rasa cukup, tadi sudah saya sampaikan waktu instruksi Pak Maman kami berikan kesempatan kepada teman-teman fraksi yang lain.

Terima kasih,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.



KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Walaikumsalam

Terima kasih,

Ya sekarang ke Fraksi Partai Golkar Pak Bambang Patijaya, silakan Pak.

F-GOLKAR (BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M.):

Baik

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore,
salam sejahtera.

Semua yang saya hormati Pimpinan Komisi VII beserta Anggota Komisi VII, Kemudian juga yang saya hormati Pak Dirjen Minerba, Pak Dirjen ILMATE, kemudian kawan-kawan dari asosiasi dari AITI maupun AETI.

Saya pikir tadi apa yang disampaikan oleh pihak-pihak menyampaikan peran seperti Pak Dirjen Minerba, Dirjen ILMATE, dan kawan-kawan asosiasi saya pikir semua sudah jelas. Cuman saya memberikan beberapa *highlight* ya.

Pertama yang saya sampaikan bahwa Bapak-Ibu sekalian, tolong jangan memandang timah ini hanya persoalan produk lokal dari Bangka Belitung, sehingga kemudian dengan sangat gampang ada keputusan-keputusan tertentu yang mungkin dalam pikiran ingin mengorbankan pertimahan dalam konteks tertentu, ya. Itu yang, yang saya harapkan tidak menjadi satu pikiran dalam mengambil kebijakan.

Saya senang bahwa di hadapan kita, Pak Dirjen Minerba juga sebagai PJ Gubernur. Jadi Mungkin kita bisa, bisa bicara lebih komprehensif seperti itu.

Bahwa Timah adalah salah satu urat nadi perekonomian Bangka Belitung selain tentu sektor-sektor lainnya. Tetapi Bapak, Ibu sekalian bahwa data di Tahun 2022 bahwa ekspor Bangka Belitung 87% adalah Timah. Saya ulangi 87% dari ekspor Provinsi Bangka Belitung adalah timah.

Kemudian secara Produk Domestik Bruto Regional, sektor pertimahan itu kurang lebih 33% lah kurang lebih dengan segala turunannya seperti itu. Dan jadi saya pikir ketika wacana ada larangan ekspor timah ini tentu menjadi satu masalah. Ya *kan*, saya cuma bisa berharap bahwa dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen Minerba dan juga tadi Dirjen ILMATE karena merupakan satu kesempatan yang, yang sangat baik. Ini baru pertama kali kita

membahas tentang pertimahan, lalu kita mensandingkan Dirjen Minerba dan Dirjen ILMATE pada satu forum yang sama dengan pelaku asosiasi juga.

Meskipun kita mendengar tadi Pak Dirjen ILMATE juga sudah mengatakan sudah ada hilirisasi, lalu pertanyaannya apakah kita harus berdebat lagi apa itu definisi hilirisasi dan apa itu definisi daripada *industrialisasi* tentang pertimahan? Ya kan sudah dipaparkan kok, jadi saya berharap bahwa dengan hadirnya dua dirjen kemudian juga kita mendengar apa yang menjadi apa unek-unek daripada para pelaku, sehingga ini lebih terang benderang seperti itu.

Saya tadi sangat senang Pak Maman juga memberikan satu *stressing* Pak Dirjen, tentang persoalan RKAB karena salah satu agenda kita di dalam pertemuan ini adalah pembahasan tentang realisasi RKAB.

Jadi saya pikir tadi sangat teknis bahwa RKAB setahun sekali ini memang membuat satu pekerjaan yang *nggak* berkesudahan *gitu*, dan cenderung menimbulkan satu ketidakpastian dalam berusaha. Saya lebih senang dengan penyampaian Pak Maman tadi misalkan per lima tahun kemudian setahun sekali itu merupakan apa evaluasi, karena yang kita perlukan itu jaminan berusaha, kepastian berusaha ya.

Jadi apalagi tadi disampaikan datanya ini *kan* apa, hanya dari pelaksanaan RKAB ini dari keputusan menteri. Jadi saya pikir perlulah Komisi VII pada kesimpulan pada rapat hari ini memberikan satu, satu kesimpulan untuk memberikan masukan kepada menteri untuk *mereview* tentang kebijakan RKAB ini, sehingga Pak Dirjen Minerba juga *nggak* kerepotan. Kalau *nggak* ya kerjanya cuma bahas masalah ini terus, sementara masalah-masalah teknis lainnya juga begitu banyak, *kan* begitu, dan inilah yang saya pikir salah satu tujuan daripada pertemuan pada hari ini.

Kemudian tadi juga sempat disinggung tentang persoalan tentang misalkan apa ya, kita eksportir nomor dua timah dunia tapi tidak bisa mempengaruhi harga dunia dan sebagainya. Saya pikir itu teknis lah ya bukannya persoalan kita *stop* ekspor lalu berubah harga, tidak begitu juga ini banyak persoalan-persoalan teknis.

Tadi Ketum AITI menyampaikan misalkan persoalan pasar komoditas kita. Komoditas kita ini memang perlu di-*review* karena memang ini dasar daripada timah harus ketika dijual bertransaksi di Bursa Komoditi itu karena keputusan menteri, bukan Bappebti ya, Bappebti, dan itu ada di Kementerian Perdagangan. Ini *kan* kita bingung nih ngurusin timah ini, hulunya di Kementerian Pertambangan, ketika dia lagi diproses hilirisasi dan sebagainya di Kementerian Perindustrian, ketika dia mau dijual di Kementerian Perdagangan, dan saling mengunci ketiga posisinya.

Ketika dia ingin investasi masuk ke dalam ada di Kementerian Investasi, bank ini tersebar di mana-mana lah ini lah akibatnya. *Nah*, jadi saya pikir Bapak, Ibu sekalian pada kesempatan yang baik ini ya kita *anu* lah, kita ada satu

komitmen bahwa ini juga penegasan daripada Dirjen ILMATE juga satu kesimpulan yang penting saya pikir, Pimpinan.

Ini perlu dijadikan dalam satu kesimpulan bahwa sudah terjadi hilirisasi di dalam pertimahan, mau apapun namanya mau industrialisasi, hilirisasi sudah terjadi peleburan dan itu sudah terjadi dari tahun 2003. 2003 saya ulangi, dua kosong-kosong tiga, itu 20 tahun yang lalu, sementara maaf, presiden masih mengatakan kita perlu meniru sektor lain misalkan nikel atau yang lain, *nggak*, yang betul itu saya sangat yakin seyakini-yakinnya Pak Dirjen bahwa timah harus menjadi contoh bagi mineral yang lainnya.

Banyak sudah terjadi hilirisasi, mau jadi industrialisasi apapun namanya sudah terjadi dan sudah terjadi penambahan nilai. Cuman sekali lagi yang ingin dipertanyakan saya, saya pernah menemukan ini hilirisasi yang seperti apa yang bikin bos-bos *happy*? Kalau yang sekarang tadi disampaikan paparan, ya *kan*.

Tim Ingot, *sorry* apa, tin *plate*, tin *chemical*, tin *plate*, *next* nya apa lagi? Memang ada beberapa turunan-turunannya lagi. Tapi *kan* tadi Pak Dirjen ILMATE juga sudah memberikan penjelasan bahwa timah ini seperti suplemen ya, seperti vitamin, Pak, Pak Dirjen. Dia di dalam komponen elektronik itu kecil, dia untuk merangkai-rangkai, *nggak* ada dia gajadi tapi dia bukan komponen utama. *Nah* ini, ini *kan* yang menarik daripada pertimahan itu.

Jadi saya pikir pada kesempatan yang baik ini, saya pikir kita sudah mendengar paparan dari semua pihak, dan saya, kita perlu mengambil satu kesimpulan bahwa sebetulnya di timah *nggak* ada masalah baik-baik saja dan jangan ada keputusan daripada pemerintah yang sembronoh tanpa mitigasi, yang kemudian *suddenly shutdown explore* pertimahan. Itu saja kesimpulan dari saya.

Terima kasih, Pimpinan.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Terima kasih, Pak Bambang.

Memang masalah larangan *export* ini tidak hanya di sektor timah, tapi berbagai sektor pertambangan mineral lainnya juga itu menjadi permasalahan.

Baik kita lanjutkan dari Fraksi partai Gerindra, Pak Ramson silakan Pak.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Makasih, Pak Ketua.



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Pak Ketua Rapat dan rekan-rekan Anggota yang terhormat,
Pak Dirjen Minerba dan jajarannya,
Pak Dirjen ILMATE dan jajarannya.

Kalau mate itu dalam Sumatera Utara meninggal *gitu*, Pak

Ketum AITI dan jajarannya,
Wakil ketua AETI dan jajarannya yang saya hormati semuanya.

Ini sudah banyak ini masukan-masukan dan juga penjelasan-penjelasan dari Pak Dirjen, Pak Dirjen ILMATE dan juga dari Ketum AITI dan Wakil Ketua AETI semua sudah cukup komprehensif.

Memang ada problem kadang-kadang para dirjen koordinasi lintas pemerintah, mungkin juga dengan DPR RI dalam membuat suatu kebijakan termasuk yang tingkatan undang-undang sampai ke Peraturan Presiden itu kadang-kadang memang ada yang kurang sinkron.

Saya berikan satu contoh Undang-Undang Cipta Kerja itu *kan* karena Pak Dirjen Minerba *kan* dulu di Deputi Menko Marinves, itu perizinan *kan* itu maksudnya *kan* untuk lebih, lebih efisien tuh untuk investasi. Itu UKM yang di bawah Pak yang di bawah 200 meter kalau dulu mengurus IMB-nya 150 meter lah itu cukup camat, sekarang bupati tetapi sangat *complicated* satu tahun juga *nggak* bakal beres. Coba dicek dulu Pak, artinya mesti ada penelitian di lapangan karena mungkin Pak Dirjen juga dulu ikut apanya tuh konsepornya.

Iya *kan*, kadang-kadang pejabat itu tidak lihat bagaimana di lapangan, contohnya waktu kami rapat dengan Pertamina dan Dirjen Migas, Dirjen Migas mau membuat pangkalan disetiap RW. Ya *nggak* bakal *survive* itu pangkalan, karena ordernya akan kecil sekali gimana dia mau *survive*. Jadi dari sisi *break event point* mau sepuluh tahun juga dia orang di pangkalan gak bakal *break event point*, *nah* itu contohnya jadi kadang-kadang *nggak* realistis.

Sekarang kita dapat banyak informasi untuk pengurusan IMB itu harus dari Pemda biarpun yang di bawah 200 meter atau di bawah 150 meter. Itu karena referensinya Undang-Undang Cipta Kerja itu, padahal poinnya *kan* untuk kelancaran. Opiniya begitu tapi realisasinya tidak, jadi saya lihat diantara ini juga soal sinkronisasi tadi ada Kementerian ESDM, kementerian Perindustrian, sama Kementerian Perdagangan.

Nah ini sebenarnya sangat diperlukan. Itu kelemahan kita jadi kadang-kadang lintas sektoral itu sulit, padahal kita sebenarnya Indonesia ini sangat apa namanya, maksud saya sumber daya alamnya luar biasa, SDM-nya juga banyak orangnya, jadi *market* yang sangat besar.

Jadi sebenarnya PDB kita itu bisa lebih besar dan bisa lebih merata kalau kebijakannya pas, kita ini memang kalau ada pertumbuhan tapi *nggak*

merata karena kebijakan lepas. Termasuk yang kejadian terjadi di mana itu yang pekerjaanya beda gaji gede *gitu*, di yang baru kejadian di mana itu? Morowali.

Seperti itu contohnya Pak Dirjen, padahal ini *kan* yang membuat gerak-gerak menteri itu *kan* biasanya dirjen, direktur waktu dulu mungkin Pak Jamaludin dimasukkan, dikasih masukan ke Pak Luhut contohnya. Ya *kan* dari situ masuk mungkin geraknya RUU Cipta Kerja koordinasi dengan orang lain.

Jadi kadang-kadang *nggak* realistis, ini pengamatan saya ini sudah saya masuk dalam sistem sejak Oktober 1999. Iya betul, dulu saya diluar mengkritisi pemerintah terus, pemerintah sebelumnya sebelum reformasi. Saya masuk di dalam lima tahun masih *oke* banget, tapi sesudah itu mulai waduh betul Pak.

Ini sampai sekarang coba, tapi kita *kan* ini sekarang misalnya saya sekarang di koalisi ya saya *nggak* bisa mengkritisi Pak Dirjen. Iya terus terang saja, biarpun ada konten-konten yang bisa saya kritisi, saya *nggak* bakal mengkritisi. Padahal untuk rakyat perlu sebenarnya, perlu sistem itu diperbaiki jadi kita proaktif ke depan.

Jadi itu yang saya lihat soal secara menyeluruh ya. Tapi soal dari bahan yang masuk ada yang menarik nih dari AETI, saya lihat di AETI ini ada dua paragraf nih, "Upaya meningkatkan penyerapan timah dalam negeri dapat dilakukan dengan mensubstitusi impor produk logam berbasis timah melalui optimalisasi produksi pemanfaatan dari dalam negeri, x menghentikan *import product* solder untuk meningkatkan permintaan dari dalam negeri. Lalu meningkatkan kapasitas produksi pabrik produk hilir timah untuk menjawab kenaikan permintaan".

Yang kedua, pemerintah juga perlu merumuskan kebijakan berupa pemberian insentif untuk mendorong pelaku usaha timah untuk melakukan hilirisasi antara lain *fiscal, tax holiday*, PPN bebas biaya masuk dan lain-lain, finansial, kemudahan pinjaman kepada bank, dan infrastruktur penyediaan lahan"

Nah ini saya lihat usulan yang baik Pak Dirjen, baik ke Pak Dirjen Minerba dan Dirjen ILMATE. *Nah* ini urusan yang baik untuk mungkin menjadi suatu kebijakan, kalau saya melihat artinya ini usulan yang baik dengan kebijakan yang dibuat presiden.

Ya *kan* saya *kan* *nggak* bisa ini kalau ya apa kebijakan Presiden Jokowi ya kita ikutin saja. Cuma usulin, usul ini bagus ya *gitu* Pak Dirjen. Ya saya terus terang aja Pak Bambang, saya *kan* koalisi *nggak* mungkin saya mau kritisi itu. Loh iya dong, iyalah biar pun dari kepala saya taktik-taktik strateginya saya *nggak* bakal keluarkan dong.

Iya, iya *kan* karena *kan* ada namanya fatsun politik, fatsun politik, loh iya *dong* hehe.

Ya jadi itu Pak Dirjen, jadi usulan AETI ini cukup bagus. Saya pikir itu aja dari saya Pak Dirjen dan Pak Ketua.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Lanjut sekarang Fraksi Partai Nasdem, dipersilakan.

Ya, saya silakan. Saya izin ke kamar mandi 3 menit, tapi silakan diajukan pertanyaannya, saya serahkan pimpinan sementara waktu ke Pak Sartono.

F-DEMOKRAT (SARTONO HUTOMO):

Baik, sementara Pimpinan saya ambil alih.

Baik, kita lanjutkan siapa ini? Pak Rudi.

F-NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.AP):

Baik, terima kasih Ketua.

Saya sedikit saja tadi sudah menyampaikan.

Yang saya hormati Pak Dirjen, ada dua Dirjen dan sekaligus Pak Gubernurnya Babel, Pak Dirjen ILMATE dan Pak Ketum dan Wakil Ketum.

Pak Ketum dan Wakil Ketum ini sama-sama ngomong tadi pak, iya *kan?* Iya *kan?* Oh beda ya.

Baik-baik.

Jadi gini Pak, saya hanya ingin memberikan sedikit masukan. Saya nggak tahu pandangan Pak Dirjen Minerba dengan AITI atau AETI. Saya punya data sedikit Pak tentang timah, tapi saya bukan berkecimpung di situ.

Ini *kan* topiknya substansinya pelarangan ekspor timah ya Pak Dirjen ya saat ini. Saya ingin kasih ilustrasi begini Pak, Indonesia ini bisa mendapat untung 6 kali lipat. Misalnya satu ton konsentrat 78% timah itu harganya 12.000 US dolar per ton, ya Pak ya, Pak Dirjen ya. Tapi jika sudah berubah menjadi timah kasar *kan* harga naik di 22.000 US dolar, betul Pak Ketua AITI? Begitu *kan?* Jadi kenaikannya 100% begitu *kan?* Nah ini satu ilustrasi gambaran.

Kemudian bila timah menjadi *tin soldier* yang Bapak sebut-sebut tadi harganya jadi 124.000 US dolar, berapa kali lipat Pak per ton? Ya Pak ya, itu data Pak, AITI, ya *kan oke*. Artinya Pak ada 6 kali peningkatan harga dan dampak pengaruhnya bagi perekonomian negara ini sangat besar Pak kalau dengan 6 kali peningkatan per ton itu. Pajaknya, *devidemnya* Pak, PNBPNya dan kenaikan pendapatan perusahaan Bapak baik secara perusahaan dan individu Pak. *Nah* itu sebagai gambaran ilustrasi Bapak, kalau *nggak* panjang lebar saya hanya kasih masukan ini.

Dan yang kedua Pak konsumen terbesar timah kita Indonesia adalah Cina.

F-DEMOKRAT (SARTONO HUTOMO):

Izin sebentar, kita serahkan kembali.

F-NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

Saya lanjut ya, Ketua ya.

Pak AITI, Pak Dirjen,

Konsumen terbesar timah kita ini yang memakai Cina, ya *kan* Pak China datanya. Ya sudah apa-apa, kalau *nggak, nggk* apa-apa. Artinya kalau negara Cina itu yang makai yang memurnikan, yang terangkat itu ekonominya mereka *kan* Pak. Mereka buat timah kasar, mereka buat tin *solder*, berapa banyak kenaikan yang didapat mereka *gitu*? Itu gambaran Pak.

Di dunia ini Pak, Indonesia ini negara kedua, kedua terbesar penghasil timah Pak, ya *kan*. Deposit terbesarnya itu karena nomor dua PNBPNya berapa Bapak tahu, 1,1 triliun per tahun itu ya Pak Dirjen. Itu dia gambarannya.

Jadi sebenarnya Pak, Pak AITI, pengusaha yang terhormat dimuliakan dan sudah sukses, *udah* kaya raya pada ini *kan*. Kalau mau sabar Pak, Bapak tambah sukses semua ini? Dengan hilirisasi dengan bukan dilarang ini, tapi bertahap prosesnya begitu.

Hanya satu memang ada sisi negatifnya masalah gugatan WTO itu *kan* terserah Pak, seperti *chemical* kemarin. Orang barang-barang kita kok, masa mobil Bapak mau digugat mau diminta sama dunia *kan nggk* mungkin, itu saja *kan* Pak konsekuensinya begitu.

Itu pandangan saya kepada bos-bos ini, bos timah semua, Pak Dirjen ya *kan* Pak Calon Gubernur. Ya *kan* Pak nyalon Gubernur juga Bapak ya? Itu massa itu Pak, suaranya banyak itu Pak, **...(suara tidak jelas 1.29.37)** asosiasi tuh.

Itu saja Ketua, saya kembalikan.

Terima kasih.



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA AITI (ISMIRYADI):

Ketua, saya interupsi bisa?

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke

KETUA AITI (ISMIRYADI):

Jadi disampaikan Bapak tadi, jadi pemakai timah tin Ingot di dunia ini tidak Cina Pak. Cina saja memproduksi 110.000 ton per tahun, kebutuhan dalam negeri mereka 115.000 ton pertahun, justru mereka hanya pakai 5 tapi dia pakai *spot* terbesar.

Jadi kita kadang-kadang kalau masalah timah ini kalau kita tidak terjun langsung ke lapangan hanya mendengar-mendengar susah. Jadi kalau harga tadi begitu masyarakat Bangka Belitung sudah bisa beli, beli mobil Alphard masyarakatnya Pak kalau kenaikannya sampai persentasenya begitu.

Tidak, tidak enak-enakan begitu dari seharga sekian OR, dari mulai OR sampai ke OC, sampai ke tim ingotnya begitu, tidak begitu paling-paling perbedaannya hanya 10% Pak. Kalau kelipatannya begitu saya *nggak* pakai mobil satu hari saya bisa, satu minggu saya bisa ganti mobil Hammer Pak, tiap minggu.

Jadi ilustrasi Bapak tadi salah Mohon maaf Pak. Iya salah dan juga pemakai ini bukan-bukan hanya Cina. Kita pelanggan kita Toyota Oso, ya *kan* Jepang, Amerika, tidak Cina, Cina punya produk sendiri Pak.

F-NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

Harga tadi betul Pak?

KETUA AITI (ISMIRYADI):

Tidak betul Pak,

F-NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

Tanya Pak Dirjen itu Pak.

KETUA AITI (ISMIRYADI):

Pak Dirjen bukan orang lapangan, kami pengusaha kami yang tahu.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke baik pak,

Saya tengah sekarang, terima kasih masukannya.

Sekarang kita lanjut, setelah Fraksi Partai Nasdem.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Pimpinan izin,

Saya tadi mau tanya terkait dengan apa yang disampaikan oleh beliau. mohon izin interupsi sedikit ya sebelum ke Demokrat. Kira-kira tadi yang Bapak sampaikan bahwa harus di sana masyarakat penambang juga yang produksi sana juga bisa beli Alphard semua sekian bisa ganti juga tiap hari, kira-kira untuk menjadikan itu kira-kira apa yang harus dilakukan supaya itu bisa terjadi?

Inikan kita cerita bagaimana caranya kita bersinergi supaya masyarakat Indonesia yang sejahtera kan bukan orang lain *kan? Nah* apa yang tadi Bapak sampaikan kira-kira untuk mencapai yang tadi Bapak sebutkan bisa setiap hari beli mobil Alphard bagaimana caranya?

Terima kasih.

KETUA AITI (ISMIRYADI):

Saya *nggak* mengatakan tiap hari mobil Alphard Pak,

(Saya ralat lagi, jadi salah pemahamannya 1.32.02). Maksud saya begini Pak, Jadi dari awal saya ingin menegaskan satu hal, kita adalah produsen nomor 2, kita adalah produsen nomor 2 di dunia. Kebutuhan dunia itu 30% dari, dari Republik Indonesia dan kebetulan di bumi Bangka Belitung adanya, ya Pak.

Kenapa kita *nggak* bisa menentukan harga? Karena kita tidak ada kehadiran, kehadiran negara dalam penyanggah timah produk Indonesia yang digunakan oleh 30% dunia. *Nggak* ada kita **...(suara tidak jelas 1.32.32)**, kita berjalan sendiri saja.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Oke baik, Itu poin yang tadi saya inginkan supaya disebut, sehingga **(suara tidak jelas 1:32:38)**.

KETUA AITI (ISMIRYADI):

(suara tidak jelas 1:32:48).

Kita tidak *export* karena mereka itu langsung dan semua memakai timah akan mencari kita bukan hanya Cina, Cina punya produk sendiri Pak dan dia lebih besar dari kita produknya. Tolong juga dicatat dibuka aja di Google, *mbah* Google tahu kok kalau Cina produknya setahun 115.000 ton. Kita hanya izinnya 75 sampai kemarin Pak Dirjennya 65.000 ton.

...(suara tidak jelas 1.33.13). Cuma kalau kita punya penyangga, negara hadir untuk menampung hasil produksi kami saya pikir negara yang mengatur itu akan naik pak harganya, itu aja kuncinya Pak.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Iya itu maksud saya tadi memancing tadi, supaya Bapak ngomong sekaligus semua.

KETUA AITI (ISMIRYADI):

Iya, *oke*

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

sehingga nanti masih ada lagi tanda tanya yang tersisa *kan*, kalau Bapak ngomong semua negara harus hadir di situ supaya pengusaha-pengusaha Indonesia inilah, yang penghasil dari Indonesia inilah yang kemudian sejahtera dan kaya, bukan orang lain begitu ya.

Terima Kasih Pimpinan.

F-NASDEM (H. RUDI HARTONO BANGUN, S.E., M.A.P.):

Izin Ketua, sedikit Ketua.

Memang itu kan saya bilang sabar Pak, bertahap mengenai pemurnian. Ada *smelter* segala macam *kan* begitu *kan*. Maksud Bapak negara hadir itu maksudnya apa?

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Nanti saja ya tanya-jawab ya, Tanya-jawab saja sudah sabar.

Sekarang kita lanjut dulu, Kasihan juga nanti teman-teman yang lain belum tersampaikan juga ya.

Baik. Silakan Pak Rusda Mahmud.

F-DEMOKRAT (RUSDA MAHMUD):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang saya hormati yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VII baik yang hadir secara fisik maupun *virtual*,
Yang saya hormati Dirjen Minerba beserta seluruh jajarannya,
Yang saya hormati Dirjen ILMATE dan dari Ketua AITI beserta seluruh jajarannya.

Mungkin hari ini saya tidak masuk dalam rapat substansi kita pada siang hari ini, karena kemarin kami menerima aspirasi dari Sulawesi Tenggara.

Pak Dirjen, jadi intinya itu antara permasalahan IUP PT CSM dengan PT Golden Anugrah Nusantara. Jadi perlu sedikit saya jelaskan menyangkut masalah kronologis pertamanya awalnya itu bahwa kalau untuk PT Citra Silika Malawa dengan kuasa pertambangan SK Bupati Nomor 540/370 tahun 2008 tanggal 16. Kemudian dengan luas yang sebenarnya itu 50 hektar, jadi yang di daratan itu cuma 30, 20 hektar. *Nah* setelah *diciutkan* 17 hektar.

Nah kemudian PT Golden Anugrah Nusantara, itu luasnya 341. *Nah* selama itu tidak ada permasalahan, mereka masing-masing memproduksi tidak ada masalah. Tapi setelah diputuskan ada tumpang tindih jadi diputus itu tahun 2014, *nah* kemudian 2019 dia menggugat.

Ini memang ada agak aneh sedikit, karena gugatan itu sudah kadaluarsa tapi dia menggugat dan anehnya ya itulah hukum kita di Indonesia, dua-duanya ini menang. *Nah* setelah menang, kok ada permasalahan? Berarti ada yang menang ditambah-tambah kemenangannya, sehingga dari IUP produksi 20 hektar menjadi 400 lebih.

Nah kalau PT Golden itu 341 hektar. *Nah* ini ada keputusan dari kementerian, eh bukan dari kementerian, dari PTSP provinsi mengatakan bahwa apa ini, itu meminta kepada Dirjen ESDM untuk mengoreksi IUP PT Silika Malawa.

Nah sekarang PT Silika Malawa ini masih memproduksi terus-menerus, sedangkan putusan PT EON yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, ini sudah mengusulkan mengajukan kepada Dirjen Provinsi Sultra permohonan mengaktifkan dan pendaftaran IUP Eksplorasi ke MODI ke ESDM, sampai sekarang belum-belum juga terbit.

Nah kalau menurut saya, bahwa harusnya dari Kementerian ESDM bagaimana supaya barang ini karena masih bermasalah walaupun sudah ada keputusan hukum menurut saya sudah tetap. Tapi harusnya Menteri ESDM itu *...(suara tidak jelas 1:38:19)* sementara. Itu permintaan kami kalau bisa kita usul di *...(suara tidak jelas 1:38:24)* sementara sambil dicari, mungkin yang

lain dicari solusinya dipanggil dua-duanya kemudian dipanggil saksi karena sama-sama mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tapi kenapa yang lain (*disalini, terzalimi 1.38.40*) sampai sekarang belum bisa berproduksi, malah Modi belum terbit sehingga melalui kesempatan ini kami mohon Pak Dirjen untuk segera (*mensokan 1.38.55*) dulu, sambil cari solusinya karena dua-duanya mempunyai kekuatan hukum tetap, dan bisa dipanggil Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara untuk mengklarifikasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mengklarifikasi.

Padahal kemarin waktu digugatannya itu disuruh hadirkan yang aslinya itu tidak, PT CSM tidak bisa menunjukkan hasil eksplorasi yang, yang itu 400 Pak tidak bisa cuma fotokopi yang dimunculkan, disuruh muncul (*ke Asia 1.39.28*) tidak.

Jadi mungkin dari Pak Dirjen supaya bisa mengambil keputusan yang sangat bijak, karena kasihan ini sudah selama berapa tahun mengurus, mengajukan, malah demo, terus apa, terus mengeluarkan duit sampai sekarang belum ada.

Tapi anehnya yang satu ini yang *menindis*, itu-itu berproduksi terus sampai sekarang. Mungkin sekian Pimpinan, saya sekian.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih, Pak Rusda.

Lanjut dari Pak Fraksi PKS, silakan Pak Menteri.

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Baik,

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat sore,
Dan salam sejahtera atas kita semua.

Jadi kembali aja kita ke laptop lagi ya.

Pak Dirjen, Dirjen Minerba, ILMATE, Pak Ketum AITI sama AETI. Jadi tadi kebutuhan dalam negeri kita Pak Ketum mengatakan 5% ya, terserap 5%. Tadi Pak Bambang juga sudah banyak bicara tentang bahwa saya ini orang elektro *hardware* terus ke *software*. Memang di elektronik itu sebetulnya *nggak* terlalu banyak ya dipakai, bahkan dalam teori fabrikasi itu sekarang timah itu

diperkecil karena dia ternyata di situ dia menjadi penghambat, penghambat arus.

Jadi yang paling banyak itu digunakan sebetulnya tembaga ya dalam *printed circuit board* itu. Bahkan sekarang kalau dia sudah jadi *chip* tuh timah itu sudah tidak dipakai, bahkan di pakai emas ya, pakai emas biasanya dalam supaya apa hambatan jenisnya kecil.

Gini pertanyaan saya adalah Pak Dirjen siapa yang memberikan *feeding* ya ke presiden sehingga kita harus men-*stop export* itu, kalau saya begini saja kenapa kita *nggak* buat *balance* seimbang? Oke suatu saat ini mungkin kita akan stop, tapi kembangkan dulu industri hilir di sini *gitu*.

Saya *nggak* tahu tadi yang seperti *food packaging* tadi itu udah ada besar-besaran belum? Itu *kan coatingnya* aja Pak ya *coatingnya* aja *kan* berarti lapisan saja dengan timah. Tapi apakah itu sudah menjadi industri besar yang menyerap timah kita?

Nah jadi kemarin kita melihat tahun kemarin bahwa timah berapa kali lipat ya? berapa ribu persen ya? Naik itu penghasilannya karena PT Timah itu menghasilkan apa mengekspor harga timah lagi naik, kemudian hasilnya besar.

Jadi kalau saya mengusulkan Pak Ketua bertahap saja, bertahap Pak Dirjen jadi kita kembangkan dulu industri di sini itu seperti apa. Saya pikir kalau industri-industri elektronik yang *hi-tech*, *hi-tech* apalagi di Bandung. Bandung *kan* orang *nggak* suka ini Pak *hi-tech* di Bandung, orang sukanya lotek ya, Bandung. Jadi *hi-tech* ini *nggak* mungkin di Indonesia di ini orang, ya.

Nah maaf nih Pak Bambang Patijaya ya, saya agak nakal juga berpikir tentang *cuan-cuan* itu tadi. Ini *kan* Indonesia ini kedua ya, pertama tadi Cina ya, ketiga Peru kalau *nggak* salah ya.

Nah ini kalau kita *stop* ekspor nih saya, saya dagang ini memang *kan* agak nakal sedikit ya. Anak saya itu kuliah di Cina S2, dia bilang, "Bi, kita tuh harus dagang dan hubungan sama Cina, cuman kita harus pintar dan dia lebih pintar dari kita. Yang pegang uang segar itu Cina bukan Amerika, Amerika udah uangnya seret kita diatur lagi gini *nggak* boleh radikal apa segala macam, banyak benar *cincong-nya gitu*". *Nah* kata-kata anak saya yang kuliah di Universitas Beijing itu, jadi sudah selesai dia.

Nah maksud saya ini kita harus pintar-pintar apakah di-*stop* ini justru supaya timah Cina yang itu terserap semua *gitu* kita, kita ini, ini makanya lobi siapa, yang *feeding* siapa? Yang *feeding* pemilik *cuan* atau dari pakar-pakar, ini pikiran nakal saya.

Jadi kalau saya sih seimbang saja, kalau memang industri di dalam negeri kita sudah siap. Apakah *food packaging* tadi, apakah timah *soldier* dikatakan ada di atau mungkin lapisan-lapisan *coating* lain, bahkan kalau ini



dikembangkan ke nano *echnology* menarik Pak Dirjen, ini bisa kita pakai timah bagus dan sangat halus barang yang di nano *technology*.

Tapi kita belum sampai di situ, tanya BRIN, BRIN belum sempat saya tanya berapa kali eh kemarin Komisi VII sudah, sudah pecat ini oh ketua, kok sampai kesitu. Ini belum bicara tentang nano *technology*, jadi kembali ke ini siapa yang mem-*feeding* ini? Saya harap Pak Dirjen nih yang mem-*feeding*.

Tadi apa tadi? Apanya urat nadi? Ekonominya Bangka Belitung umpamanya, jadi saya ingin berpikir begini *mbok yao* kita lebih untung *gitu* loh. *Nah* itu saja pemikirannya, kalau di *stop* tuh *plus-minusnya kan* harus dihitung ya *kan*. Apakah ekonomi masyarakat akan mati? Apakah *kan* biasanya Pak Bambang ini *kan back covemya* dari timah ini *kan*, kalau *nggak* salah ya itu.

Bahwa maksud saya orang Bangka Belitung itu tidur di atas timah *gitu* ya, jadi tadi saya lihat ada gambar-gambar tuh ada pakaian tuh timah seperti apa *gitu* ya.

Jadi saya usul itu *feeding* pada presiden, presiden *nggak* mungkin menguasai semua hal tapi kita harus memberikan masukan. Ya masukan yang logis, yang *make sense* yang menguntungkan untuk Indonesia. Itu saja ya.

Terima kasih, Pak Ketua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,

Terima kasih, Pak Tifatul.

Berikut dari Fraksi PAN nanti kalau tidak ada nanti kita putar terakhir saja dan silakan putaran kedua kalau ada yang ingin bertanya silakan tunjuk jari saja.

Pak, Pak Hendrik tunjuk jari saja Pak.

Putaran kedua silakan.

F-DEMOKRAT (Drs. HENDRIK SITOMPUL, M.M.):

Baik,

Terima kasih, Pimpinan.

Pimpinan dan anggota Komisi VII yang terhormat, dan juga Dirjen, Pak Dirjen beserta jajaran, dan juga Pak Dirjen ILMATE, Ketum AITI, Ketua AETI selamat datang di Komisi VII.

Singkat saja pimpinan,

Pertama saya melihat bahasa tubuh tamu-tamu kita nih sangat akrab kelihatannya *gitu*. Biasanya datang ke sini antara sosialisasi dengan pemerintah, biasanya *kan* agak bertegang ini kok akrab saya bingung juga ini, benar saya bingung nih. Jadi seakan-akan saya berpikir gini Pak Dirjen, ini Komisi VII nih apa seakan-akan istana *gitu* loh, mengadu ke istana *gitu* loh. Padahal Komisi VII ini *kan* lintas partai Pak, jadi beda juga ada koalisi ada yang berbeda *gitu*.

Nah saya pikir ini sangat mudah menurut saya ini Pak, ketika persoalan-persoalan ini kita cari solusinya. Jelas Asosiasi sudah ada iya *kan*, Pemerintah sudah hadir juga, dan komunikasi saya lihat lancar-lancar saja. Ya sebenarnya *kan* *nggak* perlu di Komisi VII ini juga, menurut saya ngapain di Komisi VII ini kalau memang akrab begini, sangat harmonis sekali mereka. *Gitu* loh,

Jadi saya heran juga ini sebenarnya persoalannya dimana ya *gitu* loh, *nah* itu kira pengantarnya Pak.

Terus Pak Dirjen sama Pak Dirjen ILMATE lah ya, ada *nggak* data neraca perdagangan *import* dan *export* timah ini Pak Indonesia, karena bisa kita kaji dari sana. Ini saya dapat ini yang *import* ya, yang 2001 ya *kan*, *eksportnya* *kan* *nggak* ada harusnya sama dong, *nggak* ada *eksportnya* Pak? Oh belum *export*, artinya saat ini nanti.

Dan juga nanti, juga kita mau ingat kalau misalnya memang sudah ada *import*, ini *export* sudah ada Pak? belum ya, belum ada ya, baik. Kalau *gitu* nanti berarti timahnya masih konsumsi *lokal*? Maksud saya saat ini, saat ini Pak, *kan* ini persoalannya saat ini *kan*.

Artinya kita pengin juga tahu neracanya, ada juga ia mengandung, industri yang mengandung timah ini *kan* juga perlu dikenal karena *importnya* sudah banyak ini Pak *kan*. Seperti tadi siapa yang menyatakan, kalau memang siapnya negara untuk bersiapin ini ya *nggak* usah *import* *kan* begitu.

Nah ini juga saya kira ini perlu disikapi dengan baik sekali lagi kalau melihat kondisi saat ini antara asosiasi dengan Dirjen Minerba ini bisa kok didiskusikan begitu. Iya, bisa didiskusikan *nggak* perlu sampai ke sini, kalau pandangan saya.

Ya *kan* ada pemerintah, Pak Dirjen *kan* mewakili pemerintah, Pak Dirjen ILMATE *kan* mewakili pemerintah. Kita ini mewakili partai-partai Politik loh Pak, *nah* jadi ini, ini saya pikir yang tahu masalahnya sebenarnya ya temen-temen semua, sudah tahu semua masalahnya *gitu* loh.

Ya mungkin ada harapan dari Komisi VII mau mendorong hal tertentu ya mungkin silakan saja *gitu*. Tapi pada prinsipnya kalau pandangan saya, ya duduk sama lah intens komunikasi, bila penting asosiasi ini dibawa langsung ke presiden Pak. Langsung di hadapan presiden saja, difasilitasi sama Pak Menteri ngadep ke presiden begini loh kondisinya.

Itu saya kira yang solusi yang tepat.

Terima kasih, Pak Pimpinan

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih, Pak Hendrik.

Silakan, Gus Syaikhul.

F-PKB (SYAIKHUL ISLAM, Lc, M.Sosio.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Pak Ketua Rapat, Pak Dirjen Minerba, dan Dirjen ILMATE, Bapak dan Ibu dari Asosiasi.

Saya tidak mengikuti betul ya persoalan timah ini, maka saya akan lebih banyak bertanya di sini kepada Asosiasi salah satunya. Saya tertarik tadi Pak, dengan pernyataan Bapak terkait pemerintah menjadi penyanggah itu maksudnya apa? Bentuk konkretnya seperti apa? Tadi *kan* katanya kalau pemerintah mau jadi penyanggah, negara hadir akan ada peningkatan kesejahteraan dan seterusnya *gitu*, ya *kan* tolong bisa di jawab interaktif.

KETUA AITI (ISMIRYADI):

Bikin *warehouse* saja Pak di Bangka Belitung.

F-PKB (SYAIKHUL ISLAM, Lc, M.Sosio.):

Bikin?

KETUA AITI (ISMIRYADI):

Warehouse di Bangka Belitung, semua hasil produksi yang di swasta kita tampung.

F-PKB (SYAIKHUL ISLAM, Lc, M.Sosio.):

Gudang?

Jadi itu dibeli dulu?

KETUA AITI (ISMIRYADI):

Iya dibeli dulu dengan harga pada saat itu.

F-PKB (SYAIKHUL ISLAM, Lc, M.Sosio.):

Terus?

KETUA AITI (ISMIRYADI):

Selanjutnya pemerintah yang mengatur dan menjual keluar,

Kami tuh tidak mampu mengaturnya tuh kenapa Pak?

Karena biaya produksi kita kan berputar terus tuh Pak, kita berproduksi berputar terus, artinya sebelum kita keluar kita sudah menghitung kita mesti membakar lagi. Tapi kalau ada hadir pemerintah sebagai *wireless* penyangga seperti LME, saya pikir kita bisa mempengaruhi harga dunia, sangat bisa mempengaruhi harga dunia.

Nah tadi disampaikan oleh AETI kita *kan* butuh pinjaman uang nih kadang-kadang Pak setengah ngemis ke bank, maka itu saya sangat marah kalau orang bicara 'Oh itu ada *cukong*', saya bilang *cukong* saya BCA, *cukong* saya adalah Bank Mandiri.

F-PKB (SYAIKHUL ISLAM, Lc, M.Sosio.):

Oke

KETUA AITI (ISMIRYADI):

Karena saya pinjam disitu *kok*.

F-PKB (SYAIKHUL ISLAM, Lc, M.Sosio.):

Oke, oke.

Iya, iya.

Terus posisi BUMN kita PT Timah di mana? Kalau di situ.

KETUA AITI (ISMIRYADI):

(suara tidak jelas 1:52:18)

Nggak maksudnya begini, kalau yang khusus sebagai penyangga yang bikin *warehouse* itu BUMN PT Timah misalnya, jadi dia yang akan beli dari Bapak-bapak kemudian dibuat *warehouse* di sana bagaimana?

Asal ada yang mau beli *gitu* ya,

Artinya bisa saya simpulkan begini, maaf Pak, jadi karena modalnya yang *cekak* itu, Bapak dan Ibu tidak bisa menahan timah itu lebih lama sehingga harus terpaksa menjual dengan harga murah.



KETUA AITI (ISMIRYADI):

(suara tidak jelas... 1:52:58)

F-PKB (SYAIKHUL ISLAM, Lc, M.Sosio.):

Loh oke, terus lalu apa hubungannya tadi dengan peningkatan...?

KETUA AITI (ISMIRYADI):

(suara tidak jelas... 1:53:08)

F-PKB (SYAIKHUL ISLAM, Lc, M.Sosio.):

Jadi artinya ditunggu sampai harga tinggi, baru dijual?

Oke,

KETUA AITI (ISMIRYADI):

(tidak ada suara... 1:53:18)

F-PKB (SYAIKHUL ISLAM, Lc, M.Sosio.):

Apa mohon maaf saya tidak kedengaran.

LME London Metal Exchange.

(tidak ada suara... 1:53:48)

Oke, oke bisa ditangkap maksudnya.

Baik, selanjutnya saya ingin ke Pak Gubernur sekaligus Pak Dirjen Minerba, jadi Gubernur Jenderal.

Gini Pak, saya memang basisnya bukan orang pertambangan ya jadi basis saya itu ilmu sosial. Di ilmu sosial itu ada satu teori yang sangat terkenal ya dan itu bertahan selama puluhan tahun tidak bisa dibatalkan oleh teori-teori baru, bahwa sebuah daerah atau negara yang menjadi atau yang punya sumber daya alam yang besar itu hampir dipastikan masyarakatnya miskin.

Ini namanya ada namanya teori apa namanya kutukan sumber daya istilahnya, teori ini tidak bisa dibantah, mau di Afrika, mau di Amerika Latin, di mana saja.

Saya ingin mengingatkan saja kebetulan karena Pak Dirjen ini *kan* menjadi gubernur sekarang jadi tahu *kan*, dari angka kemiskinan di Bangka itu berapa? Angka penganggurannya berapa? Penghasilannya orang Bangka berapa? *Kan gitu.*



Nah ini, itu saja saya tidak, saya tidak ber, maaf saya tidak memikirkan pengusaha-pengusaha di sini *ndak*, itu usaha lebih pintar dan bisa mencari-cari duit dengan caranya sendiri. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa ada rakyat-rakyat di Bangka dan Belitung yang khususnya itu kena dampak langsung dari ekstraksi industri, ekstraksi timah ini bagaimana supaya nasibnya lebih baik? Anak-anak di Bangka bagaimana supaya nasibnya lebih baik?

Saya hanya titip ini saja kepada Pak Dirjen, terkait dengan dilarang atau tidaknya ekspor saya kira pemerintah punya perhitungan yang matang, ini juga kita lihat tawaran dari ESDM ini juga masuk akal menurut saya jadi ada waktu *kan* tidak langsung dilarang, jadi ada waktu sekian-sekian tahun. Kemudian sekian-sekian tahun untuk melakukan hilirisasi dan seterusnya menurut saya sudah, sudah *oke*.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan,

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik,

Terima kasih, Gus Syaikhul.

Pak Rico, silakan Pak Rico.

F-NASDEM (RICO SIA):

Baik,

Terima kasih, Pimpinan
Terima kasih juga kepada rekan-rekan sekalian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Saya ingin bertanya sedikit saja ke Pak Dirjen, Pak Dir-Gub sekarang. Terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh rekan saya Pak Rusda, saya teringat satu kata MODI tuh Pak, MODI ini ada satu Permen yang saya *nggak* tahu Pak itu yang berapa yang di situ melibatkan Polri, sehingga karena melibatkan Polri mungkin Bapak sudah paham maksud saya karena ada beberapa kejadian yang terjadi bahwa harus ada izin dari, ada dari mana *gitu* kemudian dikasih ke ESDM sehingga MODI itu bisa dibuka atau ditutup *gitu* dengan seizinnya mereka.

Permen itu Pak, izin Pak Permen yang mana ya Pak ya?



DIREKTUR JENDERAL MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Kepmen 15 Pak Rico, tahun 2020.

F-NASDEM (RICO SIA):

Izin, Pak. Berapa?

DIREKTUR JENDERAL MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Kepmen 15, 2020.

F-NASDEM (RICO SIA):

Kepmen 15, tahun 2020.

Izin, Pak.

Kalau boleh saya tahu Pak, kira-kira Kepmen ini keluar, maksud dan tujuan Kepmen ini sebenarnya apa sih melibatkan itu?

Karena menurut saya ini menghambat birokrasi di dalam buka tutupnya MODI itu sendiri, ada dan menjadi daerah abu-abu di mana orang bisa bermain satu sama lain, anggaplah kuat-kuatan sehingga satu bisa memblok yang satu dengan cara mereka masing-masing.

Nah yang saya maksudkan adalah pertanyaannya apa yang, kenapa Permen ini sih? Yang, kenapa Permen ini, apa maksud dan tujuan apa Permen ini ada gitu?

Terima kasih, mohon intwraaktif ya Pimpinan.

DIREKTUR JENDERAL MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Sambil teman-teman,

Izin, Pak.

Sambil teman-teman cari judul Permennya yang terjadi begini, Pak Rico.

Pak Ketua, mohon izin.

Kan memang tadi kasus-kasus orang minta naik MODI, minta turun MODI, itu perlu diatur lah *gitu* ya, karena pemerintah bisa juga disalahkan kalau kita menaikkan semena-mena dan menurunkan semena-mena.

Yang menjadi pertimbangan khusus untuk keterlibatan Polri atau apa penegak hukum yang lain juga ada beberapa, kita juga mau melihat jika memang sudah mendekati ke berkekuatan hukum tetapi kira-kira kejahatan salah satu pihak itu sudah jelas, kami akan mendengarkan pendapat hukum itu supaya misalnya kalau kasusnya sudah jelas bahwa ini salah nih atau mendekati salah *gitu*.

Khusus untuk Polri, seingat saya dia bahasannya sudah masuk tahap penyidikan, ya Pak Imam? Sudah masuk dalam tahap penyidikan. Penyidikan Pak, jadi kalau Polri itu jika dari Polri mengeluarkan surat kasus ini sudah masuk dalam tahap penyidikan, maka kami akan ikut pada surat yang dikeluarkan oleh Polri itu, Pak.

Hakekat dasarnya seperti tadi, kalau memang ada kira-kira praktek salah satu perusahaan atau salah satu pihak itu berpotensi melakukan pelanggaran hukum, kami akan ikut pada pernyataan atau sikap yang disampaikan oleh aparat penegak hukum.

Demikian Pak Rico, Pak Pimpinan.

F-NASDEM (RICO SIA):

Baik, izin Pimpinan sekali lagi.

Satu lagi Pak, berarti kalau penyidikan ini belum selesai-selesai siapapun juga termasuk dari pihak ESDM dari pihak pemerintah tentunya *nggak* bisa bergerak ya?

Harus dicabut dulu ini proses penyidikan ini dibatalkan dulu baru oleh pihak Polri baru bisa ya, Pak ya?

DIREKTUR JENDERAL MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Iya Pak secara umum demikian, kalau pihak Polri tidak mengubah isi suratnya kita akan berpegang pada surat yang mereka keluarkan itu, Pak.

F-NASDEM (RICO SIA):

Baik terima kasih.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian.

F-PKS (Ir. H. TIFATUL SEMBIRING):

Sedikit tambahan, Pimpinan.

Tadi saya melihat antusias kawan-kawan Komisi VII terhadap pertimahan ini *kan* juga cukup tinggi dan juga mungkin tidak semua juga memiliki apa namanya informasi yang sama.

Saya mengusulkan saja apakah AITI maupun AETI, AETI laksanakan FGD saja untuk semua ini, biar lebih *clear* lagi ini kita jelaskan masalah ini.

Begitu, Pimpinan.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ibu Katherine, ya silakan Ibu Katherine.

F-GERINDRA (KATHERINE A. OENDOEN):

Terima kasih, Pimpinan.

Selamat sore Pimpinan, teman-teman semua, Pak Dirjen yang saya banggakan dan juga sebagai PLT Gubernur di Bangka.

Hari ini tadi kita sudah mendengarkan asosiasi dari AITI dan AETI, begitu banyak masukan mungkin Bapak sebagai PLT Gubernur dan mewakili pemerintah bisa mendengar dan memberikan saran yang baik sehingga masyarakat di daerah Bangka juga bisa melakukan penambangan dengan bisa mengekspor, atau, apapun apa yang juga membuat daerah itu berkembang.

Paling tidak Bapak sebagai PLT kan mewakili mata rakyat lokal, rakyat setempat bisa menyampaikan kepada menteri dan juga pada presiden. Sekarang kan dirjen Pak, paling tidak, keakraban untuk daerah Bangka Lebih baik.

Saya rasa sekian dan terima kasih.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih, Bu Katherine.

Ya Pak Dirjen biasanya yang namanya *conflict of Interest* itu negatif Pak, tapi dalam konteks Bapak positif Pak. Ya Dirjen Minerba sekaligus mengurus-mengurus Babel yang memang banyak urusan pertambangan ya Pak.

Ibu-Bapak,

Saya minta izin kepada anggota untuk bisa mengajukan pertanyaan dan ini terkait larangan ekspor dan tadi disampaikan oleh Pak Tifatul yang juga ada kaitan dengan RKAB Pak, dan adanya larangan ekspor yang berlaku untuk

komoditas tertentu pada bulan Juni 2023, tentu itu akan mengganggu para penambang untuk melakukan RKABnya. RKAB hanya bisa dicapai sampai dengan Juni 2023 ini, setelah itu apa?

Terhadap negara itu juga neraca ekspor itu juga menjadi tanda tanya, hanya bisa dilakukan untuk 6 bulan. *Nah* bagaimana untuk menyikapi hal tersebut Pak?

Ini juga adalah salah satu bentuk keprihatinan kami dan fokus kami juga untuk melihat bagaimana kita bisa, apa namanya, bisa menanggulangi permasalahan larangan ekspor ini terutama disaat memang kita sangat membutuhkan, membutuhkan devisa dari hasil *export* pertama dan kedua di antara mereka yang memang sudah ada melakukan proses hilirisasi harus dibedakan dengan sektor-sektor yang sama sekali belum melakukan hilirisasi tersebut.

Saya kira mungkin itu Pak masukan dari kami untuk nanti bisa ditanggapi sekaligus Pak Dirjen Minerba, Dirjen ILMATE, teman-teman dari AITI dan AETI.

Kami persilakan, Pak Dirjen.

Pak Dirjen Minerba maksudnya.

DIREKTUR JENDERAL MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Secara keseluruhan ya Pak dari semua?

Baik,
Terima kasih, Bapak Pimpinan,
Bapak-Ibu sekalian

Kami banyak mendapat masukan termasuk dari teman-teman Asosiasi Perusahaan. Kalau saya satu persatu ya Pak, Pak Bambang Patijaya tadi mengenai kepastian berusaha, termasuk yang disampaikan oleh Pak Maman tadi mengenai RKAB lima tahunan akan kami sikapi secara positif Pak.

Saya kira secara penyederhanaan prosedur bagus, hanya kami sedang mempelajari apa sih ada, adakah dampak negatifnya *gitu* karena dinamika juga cukup cepat, soal praktek kegiatan pertambangan, soal harga, dan lain-lain mungkin memang bisa kita sikapi dengan revisi.

Namun kami akan mendalami masukan dan usulan ini sehingga nanti bisa membantu lebih baik untuk perusahaan. Mengenai pasar komoditas termasuk tadi disampaikan oleh AITI, badan penyanggah perlu kebijakan memang ini Pak, sudah cukup lama di wacana *kan* tadi sejak 2003 tadi saya dengar tadi, 2008.

Ini bagus Pak, hanya memang saya kira siapa yang menjadi, siapa yang akan menyediakan dananya untuk penyanggahan itu? Sebetulnya sempat juga saat ini ya Pak, ada wacana eksportirnya satu saja misalnya *gitu kan*, sempat ada wacana begitu ya.

Nah mungkin *nih* kalau PT Timah mau menyatakan kami saja eksportirnya sudah kami beli semua *gitu*, sehingga dia bisa juga demikian. Namun ini adalah masukan yang bagus dan bagian dari politik pertambangan kita barangkali secara keseluruhan yang akan kami dalam lebih jauh.

Kemudian mengenai, saya kira sama nih Pak Ramson juga tadi substitusi impor peraturan jangan terlalu rumit, saya kira ini sedang kita usahakan juga.

Pak Rudi tadi mungkin menghitungnya, beliau sudah tidak ada. Mungkin tidak linier soal harga angka-angka yang 6 kali lipat dan lain-lain itu sudah disampaikan juga, ada memang peningkatan penerimaan negara atau peningkatan nilai tambah dari proses hilirisasi itu.

Kemudian Pak Rusda, kami akan perhatikan khusus Pak. Ini mengenai nikel ini *kan* yang dimaksud komoditas ya, yang disampaikan Pak Rusda tadi, akan kami perhatikan namun mirip-mirip dengan jawaban saya terhadap Pak Rico tadi kalau ada kasus-kasus seperti ini upaya kami memang untuk memberikan keadilan, namun sering-sering kami tidak dapat juga berlaku seperti lembaga peradilan Pak di pemerintahan ini.

Sehingga jika ada keputusan pengadilan kami akan ikut keputusan pengadilan, namun kalau tadi usulan Pak Rusda untuk menghentikan sementara akan kami dalam jika ada dasar hukum yang mendukung untuk melakukan itu akan kami pertimbangkan namun, jangan, tidak nanti kami akan lihat lagi peluang-peluang yang lainnya.

Kemudian Pak Tifatul, beliau juga sudah tidak ada. Saya kira semua yang disampaikan oleh Pak Tifatul sudah kami laporkan tadi. Mengenai bertahap, mengenai kembangkan dulu industri hilirnya, kita harus lebih untung sepakat dan siapa yang menyampaikan masukan kepada presiden kami tidak tahu, Pak.

Tapi perlu saya tegaskan sebetulnya timah ini belum dilarang *gitu ya*, belum dilarang *export* timah ya. Saat ini baru disampaikan ketika kunjungan Presiden Joko Widodo di Bangka bulan Oktober yang lalu, beliau hanya mengatakan akan kami larang tapi waktunya kapan sedang diperhitungkan. Jadi saat ini ekspor logam timah belum dilarang.

Kemudian Pak Hendrik Pak, *alhamdulillah* kalau rapat ini sangat akrab memang pada dasarnya kita akrab dan baik-baik saja Pak, kalau kita lihat tanggapan semua tadi pada dasarnya tidak ada yang menolak ya Pak ya, saya tadi bilang tidak ada yang menolak hanya kita perlu menata saja supaya tadi kalau bahasanya Pak Tifatul kita semua paling untunglah gitu.

Itu lah yang sedang kita jaga supaya termasuk juga misalnya aspek pembukaan lapangan pekerjaan Pak, jadi dengan kita membuat pabrik baru tadi *msp* misalnya, mengatakan membuat tin *plate* itukan nanti akan bangun pabrik, Pak. Bangun pabrik aspek lain yang juga penting bagi kita adalah pembukaan lapangan pekerjaan.

Sehingga kalau saya tangkap dari diskusi kita sore, ini saya tidak mendengar ada yang melarang usulan untuk larangan ekspor, hanya sebagian besar mengatakan mari kita lakukan pelarangan ini secara cermat, secara diperhitungkan dengan baik-baik agar jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan.

Mengenai Gus Syaikhul mengomentari kutukan sumber daya Pak, saya cenderung mengatakan tidak terjadi Pak kasusnya kalau di masyarakat Bangka Belitung, Pak. Kemarin data kemiskinan Pak, tingkat kemiskinan di Bangka Belitung itu nomor 2 paling rendah Pak, hanya 4,61% Pak ada 3 wilayah yang segitu.

Namun yang saya kira dampak tidak langsungnya Pak yang barangkali perlu kita angkat jadi kutukan itu tidak dalam bentuk langsung ekonomi saja, tapi interpretasi saya ya Pak, kutukan tidak langsung itu misalnya angka partisipasi sekolah rendah Pak hanya 8 tahun 2 bulan *gitu* ya.

Angka pernikahan dini paling besar kontribusinya secara nasional, narkoba mulai marak. Mungkin itu kutukan yang juga bagian dari ini Pak, artinya ada uang yang berputar cepat, orang muda dapat uang *gitu* sehingga terjadi hal-hal negatif seperti itu.

Kalau dari kalkulasi ekonomi tadi disampaikan Pak Bambang Patijaya memang dominasi satu-dua komoditas ini perlu kita imbangi dengan diversifikasi atau transformasi ekonomi, Pak. Kalau sekarang praktis yang mengatur, bukan mengatur, yang membuat orang sana belanja banyak uang atau tidak banyak uang itu timah sama sawit Pak.

Nah kita sedang berusaha supaya ada juga kegiatan pertanian, perikanan, dan lain-lainnya juga meningkat.

Pak Rico tadi sudah saya jawab ya Pak kepentingan masyarakat, itu tentunya sudah pasti kita hitung. Kalau soal larangan ekspor ini, mungkin masyarakat yang menyambang langsung itu tidak akan merasakan dampak langsungnya pada saat yang pendek *gitu* ya, lebih terasa itu di perusahaan-perusahaan yang menengahnya seperti teman-teman ini, di situ yang lebih terasa.

Kalau masyarakatnya, yang apalagi yang bermitra di IUP-IUP itu ya dia ngambang aja terus begitu, hanya yang nampung produknya ini yang nanti akan terdampak secara langsung.

Kemudian Pak Eddy tadi mengenai membedakan antara yang sudah melakukan hilirisasi sama yang belum, kalau di komoditas yang lain Pak,

praktis kita semua menuju larangan ekspor bahan baku Pak. Itu ada kewajiban membangun *smelter* yang saat ini rekomendasi *export*-nya itu ditentukan oleh capaian kemajuan pembangunan, pembangunan *smelter* yang disampaikan dalam kurva S ya.

Jadi memang ada perbedaan kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan hilirisasi dengan yang tidak melakukan hilirisasi untuk *export*-nya.

Mengenai larangan Juli 2023, yang saya pahami di beberapa perusahaan yang besar-besar khususnya Pak, di MIND ID itu sedang juga didiskusikan bagaimana menyikapinya. Kalau RKAB sebenarnya kami tergantung pengusulan saja Pak, akan kami proses. Namun tentunya badan usaha lah nanti yang akan lebih mengambil sikap *gitu*, kalau misalnya dia bisa menyerap bahan bakunya tapi tidak bisa menjual produknya barangkali mereka sendiri yang akan mengajukan revisi RKAB-nya.

Jadi kalau dalam konteks berusaha, saya kira kita akan terus melakukan komunikasi erat dengan badan usaha yang melakukan kegiatan-kegiatan ini.

Secara umum Bapak, Ibu Pimpinan Anggota Komisi VII yang terhormat kami menterjemahkan kebijakan larangan *export* ini sebagai upaya bersama untuk mendapatkan penerimaan negara yang lebih besar, bahwa akan ada dampak itulah upaya-upaya mitigasi yang kita lakukan bersama-sama.

Demikian Pak Pimpinan, Bapak, Ibu sekalian. Terima kasih.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih, Pak

Sebelum ke Pak Dirjen ILMATE, tetapi begini Pak.

Tadi apa yang disampaikan, mengutip apa yang disampaikan Pak Tifatul ya. Mohon maaf, tapi siapa memberikan masukan ini kepada presiden *gitu* loh? Sehingga mengeluarkan apa, larangan ekspor dan larangan ekspor itu seakan-akan datangnya *sekonyong-konyong gitu*, Pak. *Sekonyong-konyong* disampaikan apa pelaku industrinya itu kaget ya, apa namanya mestinya harus ada apa namanya, ada masa transisi paling tidak ada masa sosialisasi disampaikan bahwa akan ada larangan ekspor kalau tidak membangun *gitu*, Pak.

Memang kalau kita melihat di masa lampau, memang sudah diberitahu berkali-kali pun apa banyak juga yang tetap mangkir untuk membangun *smelter*, tetapi saya kira sekarang sektornya kan sudah variasinya banyak, Pak. Tidak hanya apa tembaga saja, sekarang sudah ada bauksit ya dan lain-lain *gitu*, Pak.

Jadi saya kira, itu perlu di mendapatkan pertimbangan kasihan juga Pak karena ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut lapangan



pekerjaan, menyangkut ekonomi sekitarnya yang bisa *eh* apa gagal tumbuh berkembang dengan cepat kalau memang itu diberlakukan padahal sekarang sudah ada apa usaha di bidang penambangan dari internal atau dari sektor pertambangan tersebut, gitu Pak.

DIREKTUR JENDERAL MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Terima kasih, Bapak Pimpinan.

Terima kasih ini mengingatkan tadi di awal saya katakan memang kan kalau kita dengar pernyataan presiden, saya teruskan tidak tahu siapa yang memberi masukan hanya langkah antisipatif untuk timah ini hemat saya adalah paling sistematis kita siapkan, Pak.

Kalau nikel *kan* sudah dilarang sejak 1 Januari 2020, kemudian yang lain-lainnya juga dilarang. Kemudian kemarin ketika presiden mengatakan melarang bauksit, nanti akan dilanjutkan dengan antara lain disebut timah begitu Pak ya.

Nah itulah yang kemudian kami antisipasi dengan membentuk kelompok kerja yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga, serta pelaku usaha sudah menyampaikan laporan Pak, jadi tadi yang saya sampaikan itu sebagian besar adalah intisari dari laporan yang kami susun. Dari kami sudah kami sampaikan kepada Pak Menteri ESDM dan dari saya yakin pak Menteri ESDM juga sudah memahaminya dan mudah-mudahan sudah mengkomunikasikan juga Pak.

Jadi *insya* Allah kalau untuk konteks timah ini Pak, rasanya sudah kami pikirkan sehingga tadi kami dengar dari MSP juga sudah mulai berkomunikasi dengan perusahaan dari Itali, beberapa perusahaan lain juga sudah mulai berkomunikasi.

Demikian, Bapak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya, terima kasih.

Silakan dilanjutkan Pak Dirjen ILMATE.

DIRJEN ILMATE KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (TAUFIEK BAWAZIER):

Terima kasih, Pimpinan.



Jadi gol dari hasil diskusi siang hari ini saya kira sangat positif sekali, jadi ini saya kira ini perlu ada pemahaman sebenarnya, terminologi. Kalau buat kita namanya bahan mentah, itu bahan baku yang tidak ada nilai tambah itu saya kira positif untuk dilarang ekspornya.

Tapi kalau dia sudah melakukan satu *value added*, ada pengolahan di dalam negeri ia tidak apa-apa diekspor karena itu *value added* dan kita jadi *supply*, *supply chains* dunia bagian dari situ ada nilai tambah dan itu akan menciptakan sebuah kemakmuran, kemakmuran buat masyarakat setempat, juga penerimaan buat negara ini juga penting sekali. Jadi artinya terminologi larangan ini juga harus dipahami secara baik.

Yang kedua terminologi hilirisasinya juga harus dilihat karakteristik produknya, karakteristik mineral, karakteristik material. Jadi kalau timah itu adalah seperti suplemen, seperti material jarang. Dia adalah vitaminnya industri, dipakai tadi seperti Pak Menteri tadi Pak Tifatul mengatakan bahwa memang semakin lama juga semakin kecil, atau semakin dalam *high tech* mungkin semakin kecil dan ini memang dibutuhkan.

Nah inilah yang perlu tadi konsep nanti investasinya, siapa yang punya IUPM itu yang akan kita tarik di dalam negeri dan menjadi bagian *supply chains* dunia karena bahan baku kita banyak.

Nah di sinilah proses keseimbangan *police*, apa *policy* kita jadi ini yang menjadi bagian penting untuk pemahaman bersama, jadi ini perlu ada syarat *policy* dipahami semuanya, jadi kita bisa bersama-sama untuk membangun negara ini dengan kedaulatan mineral dan kedaulatan sumber daya nasional kita semakin positif buat negara.

Saya kira itu, Pak Pimpinan jadi industri kita tetap maju untuk ke depan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih, Pak Dirjen.

Silakan, Pak Ketum AITI.

KETUA AITI (ISMIRYADI):

Terima kasih, Pak.

Saya ingin menyampaikan nanti mungkin tadi Bapak *kan* bilang, bisikan ke presiden bahwa harusnya presiden bicara begini seharusnya seluruh pengurus sumber daya alam di Republik Indonesia ini berkacamata dengan pengusaha *smelter* timah yang ada di Bangka Belitung, karena apa Pak kami merasakan itu dua puluh, 2003 akhir, 20 tahun belum ada aturan undang-undang, masih mengacu kepada Undang-undang Minerba 1967, kami sudah

bikin *smelter*, saya *smelter* swasta pertama Pak, Dona Kamajaya nama anak saya. Seharusnya begitu, jadi disampaikan oleh Pak ILMATE ini nih bahwa kami ini sudah hilirisasi sampai kami diatur oleh Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan, sampai dengan PBI semua diatur untuk harga dunia, untuk apa pasokan dunia.

Jadi kalau ini misal terbalik contohnya nikel salah, contohnya pengusaha sumber daya alam timah itulah contoh yang benar-bener mau sumber daya alam yang benar. Belum ada undang-undangnya kami sudah berpikir berinovasi, Pak.

Oh ini harga nilainya tambangnya tinggi, kalau misalnya toh sekarang pemikiran pemerintah untuk ini tidak bisa ujuk-ujuknya langsung *stop*, masa *stop* itu tolong dipahami betul kata Pak tadi mitologinya apa? Hilirisasi itu apa? Industrialisasi itu apa? *Nah gitu* loh.

Jangan bikin ketakutan dikami seolah begitu di-*stop* Pak, kami gak bisa nambang lagi Pak, ya sudah kami demo, selesai. Jawaban saya sederhana Pak, saya mantan orang Partai *kok*. Demo satu suara, sampaikan suaranya kemana? Kata Bapak tadi, ya satu-satunya ke Dewan Perwakilan Rakyat, Pak.

Biarpun ada hadir pemerintah, kami butuh juga suara perwakilan kami. Untuk apa kami pilih mewakili dapil kami?

Kan saya juga pernah dipilih oleh masyarakat, jadi itu Pak kalau misalnya ada, ada pertanyaan titip **...(suara tidak jelas 2.19.13)** Pak. Harusnya Presiden menyampaikan contoh kalau sumber daya alam yang benar itu adalah pengusaha *smelter* yang ada di Bangka Belitung, *plus* PT Timah.

Jadi PT Timah tuh *icon* Pak, *icon-Icon* *smelter* pertama, *smetler* pertama di Republik ini PT, PT Timah dari mulai pakai tanor di Peltim sampai sekarang.

Nah kami meneruskan itu dengan teknologi lagi, sudah ada jalan jadi kalau misalnya nikel salah eh, kamu datang ke Bangka Belitung itu contohnya, sudah selesai.

Saya pikir itu Pak contohnya, ya.

Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Terima kasih Pak ketum AITI,

Jadi kalau memang apa, kami-kami di DPR memperjuangkan aspirasi apa, teman-teman itu Pak jangan lupa Pak nanti 2024 Pak Bambang Patijaya dipilih lagi dicoblos lagi Pak, *gitu* Pak.

Silakan Pak Wakil Ketua AETI.

WAKIL KETUA UMUM AETI (HARWENDRO ADITYA DEWANTO):

Iya, baik Bapak.

Terima kasih, Pak Pak Wakil Pimpinan.

Singkat saja tadi mengenai nilai tambah saya sangat setuju sekali Pak, karena kalau kita ditingkatkan menjadi tin *solder* itu akan meningkatkan ada nilai tambah bagi negara juga.

Tapi perlu diketahui juga Pak, kami ini pengusaha ini isinya orang ITB semua Pak penambang semua, jadi batasan kami sesuai dengan undang-undang yang berlaku kami hanya sampai *smelter*, dengan mengolah timah sampai 99,9%.

Nah selebihnya industri lain, *nah* itu perlu dipikirkan juga Pak, kami juga butuh waktu untuk mempelajari hal itu sebagai pengusaha. Apakah nanti industri hilirisasi ini akan *visible* atau tidak? Nanti *kan* yang tentukan juga tergantung nanti dari perusahaan-perusahaan yang kita tunjuk sebagai pembuat FS nantinya.

Dari kami dari PT MSP sudah siap Pak melakukan FS, *insya* Allah kajian akan selesai dalam waktu dekat kalau misalnya memang itu *visible* kita lakukan hilirisasi, maka kita akan melakukan hilirisasi segera. Tapi kalau memang itu tidak *visible nah* nanti akan saya laporkan ke Pak Dirjen, Pak Gubernur, dan juga Pimpinan Komisi VII mengenai hasilnya.

Jadi jangan sampai nanti presiden kita mendapat bisikan yang, yang salah seperti yang tadi disampaikan Pak. Karena kalau sudah, apa sih itu sudah ada, *nah* itu kan kita sudah kajian itu juga sangat-sangat ini ya, sangat komprehensif dan sangat lengkap *gitu*, Pak.

Mungkin itu saja tambahan dari saya, Pak.

Makasih,

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Terima kasih, Pak

Memang idealnya kalau karena kita sebagai negara penghasil komoditas dan mampu melakukan hilirisasi Indonesia layaknya menjadi basis untuk ekspor Pak, kalau hilirisasi jalan-jalannya sekedar pasar. *Kan* sekarang kita pasar aja *gitu* Pak, apalagi bukan hanya pasar untuk ke apa namanya



produk-produk yang diproduksi oleh asing tapi pasar barang bekas pun oleh asing kita jadi pasar besar.

Begitu Ibu, Bapak

Saya

DIREKTUR JENDERAL MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Izin, izin meralat Pak Pimpinan

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Siilakan,

DIREKTUR JENDERAL MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Mohon maaf, izin meralat tadi informasi Pak Rico, Kepmen 15 tahun 2022 Pak.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Ya, terima kasih Pak.

DIREKTUR JENDERAL MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Itu saja Pak Pimpinan

Terima kasih, Pak.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik Ibu-Bapak sekalian

Kalau memang tidak ada lagi kita bisa masuk ke draf kesimpulan, mohon di *upload*.

Baik saya bacakan, draf Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Dirjen ILMATE Kemenperin RI, dan Rapat Dengan Pendapat Umum dengan Ketua Asosiasi Eksportir Timah Indonesia AETI dan Ketua Asosiasi Industri Timah Indonesia AITI, Rabu, 1 Februari 2023.

1. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI agar persetujuan Rencana Kerja Anggaran dan biaya RKAB sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan dilakukan setiap 5 tahun sekali. Terkait hal tersebut Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI perlu melakukan revisi terhadap PP Nomor 96 tahun 2021, permen ESDM nomor 7 tahun 2020, Kepmen ESDM nomor 1806/K/30/MEM/2018 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Bagaimana Ibu-Bapak?

(RAPAT: SETUJU)

Setuju Pak? Pak Dirjen?

DIREKTUR JENDERAL MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Setuju Pak, hanya saya lagi berpikir 5 tahunnya mau dikunci atau bisa tidak 5, 3 tahun misalnya. Karena terus terang kami perlu pendalaman sih Pak intinya, kalau bapak mendesak saja saya terima-terima aja *gitu*. Hanya bahwa kami bisa 5 tahun atau tidak 5 tahunnya bagaimana kita menterjemahnya, Pak.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Atau kita ganti di atas 1 tahun ya? sekarang *kan* pertahun ya Pak, ya.

F-NASDEM (RICO SIA):

Izin Pimpinan,

Masukkan saja Pimpinan, mungkin kalau memang mau dikunci 5 tahun mungkin ada kalimat yang menyatakan dapat misalnya ya ada tambahan evaluasi, dievaluasi misalnya tiap 2 tahun sekali mungkin itu lebih bagus, daripada kunci tanpa *nggak* ada apa-apa *gitu kan*. Tetap apapun yang terjadi *kan* itu harus dievaluasi juga.

Begitu mungkin, Pimpinan

Terima kasih.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Izin Pimpinan,

Interupsi, Pimpinan.

Saya pikir kata-kata 5 tahun sekali ini *kan*, ini *kan* merupakan usulan dari kami dari Komisi VII kepada Kementerian ESDM. *Point*-nya adalah sebetulnya jangan 1 tahun sekali Pak.

Nah saya pikir ruang yang diberikan tuh 5 tahun sekali saya pikir cukup, cukup realistis sehingga dengan apa pengawasan, pelaporan, dan sebagainya. Jadi saya pikir lebih baik kita dengan kata-kata seperti itu Pimpinan.

Makasih.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Pak Ketua, ini kan terusannya menteri ya, Pak Dirjen ya?

Jadi ini sebenarnya urusannya ke menteri, apa bisa Dirjen?

DIREKTUR JENDERAL MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Izin mengabari Pak,

Sebetulnya kalau bahasanya Komisi VII mendesak, saya *nggak* keberatan. Hanya saya sekarang tidak bisa mengatakan iya kami terima untuk 5 tahun. Mungkin bahasa saya begitu Pak.

Terima kasih, Pak

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Karena kebetulan besok kita *kan* rapat dengan Menteri ESDM, bagus besok soal ini karena *kan* urusannya ini Peraturan Menteri.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Nggak apa-apa Pak.

Saya kira ini tetap kita masukkan sini, besok kita berikan penguatan lagi dengan Menteri ESDM, Pak.

F-GOLKAR (Ir. LAMHOT SINAGA):

Pimpinan, bisa sedikit.

Ya memang saya lebih sepakat kalau lebih dari 1 tahun ya, karena 5 tahun ini juga *kan* perlu pendalaman lebih lanjut *gitu*. Apakah memang lebih efektif 3 tahun, 4 tahun, *nah* ini *kan* perlu *nggak* bisa tanpa pengkajian *gitu*.

Jadi saya sepakat 5 tahun pun *kan* lebih dari 1 tahun. *Nah* lebih fleksibel jadi ada aspek fleksibilitasnya untuk tahunnya, itu yang pertama.

Kedua, saya mau tanya nih Pak Dirjen, memungkinkan *nggak* RKAB ini (mulai 2.26.52) Pak? Karena kan tidak semua data-data itu juga data lama *gitu kan*.

DIREKTUR JENDERAL MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Prosesnya semua *online*, Pak

F-GOLKAR (Ir. LAMHOT SINAGA):

Prosesnya semua *online*, artinya kalau *online kan* sebenarnya ya tidak rumit-rumit amat *gitu kan*. Kalau *online* kenapa musti jadi rumit *gitu ya*?

DIREKTUR JENDERAL MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Izin menjawab saja,

Kalau Pak tadi saya sampaikan sebagian besar yang menyebabkan dia lambat itu adalah hal-hal yang sudah tidak prinsipil juga Pak, misalnya nama direksi yang ada di MODI berbeda dengan nama yang ada di dokumen *gitu*, nomor KBLI salah *gitu*, hal-hal kecil sebetulnya sih Pak.

Artinya yang prinsip yang hal-hal berprinsip mendasar teknis itu misalnya soal umur tambang, cadangan itu prinsip Pak. Tapi kalau banyak hal-hal kecil juga yang menjadi penghambat.

F-GOLKAR (Ir. LAMHOT SINAGA):

Tapi semua pengajuannya harus lewat *online*? Tidak bisa yang non *online gitu ya*? Semua *online*?

DIREKTUR JENDERAL MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Regulasinya *online* Pak, kecuali kalau ada kendala seperti tadi gak bisa masuk MODI, *nggak* bisa ber-RKAB karena ditolak, dan lain-lain kami layani juga Pak.

F-GOLKAR (Ir. LAMHOT SINAGA):

Oke, baik.

Makasih.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Pak Ketua intrupsi, Pak Ketua.

Saya pikir juga 5 tahun terlalu panjang, ini *kan* kepentingan nasional ya, bukan kepentingan apa namanya anggota atau apa. Kita lihat 3 tahun sih, agak pas lah kalau diajukan 3 tahun. Jadi tetap ada evaluasi.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Interupsi, Pak.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Ya dong, karena ini *kan* untuk kepentingan pendapatan nasional, perubahan-perubahan di perusahaan, itu

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Interupsi Pak, beri masukkan Pak.

F-GERINDRA (Dr. RAMSON SIAGIAN):

Itu, Pak ketua.

Jadi kalau 3 tahun saya pikir agak cocok lah dari satu naik ke 3, usulan ya artinya maksud saya kita mengusulkan, kita mengusulkan yang logis juga. Kita *kan* parlemen ini *kan*, artinya bukan seperti tawar-menawar beli apa di pasar *gitu*.

Jadi yang logis, evaluasi itu, artinya misalnya dari Kementerian ESDM kenapa harus 1 tahun sebelumnya ini? Ya *kan* kita tahu dong ininya. Kita *kan* *nggak* tahu ini *kan* dari perusahaan tambang ini sumber daya alam kita, selama ini juga terus terang saja banyak yang tidak efektif juga penggalian sumber daya alam kalau kita mau buka-bukaan nih, orang bisa menjadi kaya raya dalam sebentar dengan sumber daya alam itu, menjadi orang terkaya lagi di Indonesia ini sekarang, dari batubara.

Windfall profit apa yang ada ke Indonesia disumbangkan, kalau dulu minyak saya sejak tahun 99 sudah di sini *windfall profit*-nya betul-betul untuk pembangunan Indonesia. Ini *windfall profit*-nya dengan harga batubara sampai 400 US dolar per metrik ton apa?

Apa yang diperbuat ESDM, untuk republik ini banyak yang masih miskin-miskin, utang juga makin banyak tapi satu sisi orang yang di bidang itu jadi orang terkaya sekarang melewati yang sudah ber generasi-generasi, misalnya pabrik rokok sudah dari kakeknya tuh, ini sebagai loncatan saja jadi terkaya.

Jadi itu maksud saya itu yang digali sumber daya alam, kita harus lihat secara menyeluruh. Saya tidak ada kepentingan saya di situ, saya *nggak* ada main di pertambangan, *nggak* ada apa-apa tapi melihat secara menyeluruh saya di komisi ini sudah sejak Oktober 99, jadi harus kita lihat *gitu*.

Pak Ketua,



Saya juga dulu sebelum di DPR juga saya pengusaha di Priok sana sampai tahun 2000, sesudah itu saya *stop*, mulai saya umur 22 saya, tapi saya pas masuk DPR saya berhenti.

Jadi mesti kita lihat Pak Ketua kepentingan pengusaha, negara, dan rakyat *gitu*. Jadi saya usulkan 3 tahun, 3 tahun tapi memang sistem birokrasi itu harus dirapikan, ini jangan *kan* itu tadi soal perizinan saja undang-undang apa itu Cipta Kerja bukan malah mudah, malah sulit untuk UKM-UKM untuk mengurus IMB.

Cek saja Pak Dirjen, tugas *kan* anak buah ngecek di lapangan di kabupaten-kabupaten sana berapa yang sudah antri izin IMB yang 200 meter ke bawah untuk usaha-usaha.

Jadi itu yang artinya kita mesti lihat lebih apa namanya lebih dari menyeluruh *gitu*, jadi usul saya sih 3 tahun saja, tetap harus ada evaluasi dari Kementerian ESDM sebagai mewakili rakyat. Cuma memang sistem kerja di ESDM harus dirapikan, harus dikontrol.

Jadi audit bukan hanya, audit sebenarnya keuangan dari anggaran yang masuk ke ESDM, audit kerjanya ini yang harus perlu. Ini yang masih kurang lemah kita di BPK juga kelemahannya di situ, harus bisa mengaudit kerjanya sehingga produktivitas bagaimana, efektif *nggak gitu*.

Jadi bukan dari sisi penghematan anggaran, efektivitas yang dihasilkan oleh kementerian itu terhadap pembangunan bangsa ini. Jadi itu usul saya 3 tahun Pak ketua.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Makasih, Pak Ramson.

Jadi ini Pak, saya kira tadi usulan yang disampaikan Pak Ramson bagus, tapi usulan yang disampaikan Pak Lamhot juga saya kira membuka ruang ya jadi kita bisa fleksibel, saat di atas 1 tahun itu apa namanya bisa juga berarti 3 tahun, 2 tahun, 5 tahun itu loh dan yang terpenting kelihatannya memang diperlukan pengkajian, pengkajian lebih lanjut berapa lama memang idealnya RKAB itu di ajukan kalau itu kita rubah peraturan di atas 1 tahun.

Saya kira perlu pengkajian lebih lanjut ini usulan dari kami untuk kepada teman-teman anggota kalau memang kita menggunakan bahasa ini agar kita bisa membuka ruang untuk pengkajian, termasuk juga ada fleksibilitas untuk ke periodisasinya.

(RAPAT: SETUJU)

Setuju ya?



Baik, kita setuju ya Ibu, Bapak ya.

Baik, kemudian

2. Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI agar melakukan evaluasi pemberlakuan larangan, bukan pelarangan, larangan ekspor komoditas mineral logam khususnya bagi pelaku usaha yang sudah melakukan investasi hilirisasi pertambangan.

Saya kira ini bahasanya apa namanya

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Perlu ditambahkan Pimpinan

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Iya karena bukan hanya persoalan Dirjen Minerba saja, ada Dirjen ILMATE juga. Malah pertanyaannya itu *kan* sebetulnya yang melarang itu siapa? Saya *kan* tadi berdiskusi dengan Pak Dirjen, bukan Pak Dirjen yang melarang, iya *kan* juga bukan Dirjen ILMATE yang melarang, *gitu* loh.

F-NASDEM (RICO SIA):

Izin Pimpinan,

Ini *kan* belum ada larangan, jadi kalau dimasukkan di dalam sini *kan* lucu kalau ini ada apa diminta melakukan evaluasi pemberlakuan larangan, larangannya aja belum ada mau dievaluasi apa yang mau dievaluasi?

Wacana ya mungkin ya,

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Memang sebenarnya ada larangan untuk ke komoditas lain makanya ini *kan*.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Kan karena RDP kita ini RDP tentang mineral logam timah, jadi spesifik saja.

Ini *kan* memang sudah ada wacana mau dilarang jadi apa antisipasinya *kan* seperti itu.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Kita akan melakukan evaluasi terhadap rencana ya, ya terhadap rencana, melakukan evaluasi terhadap rencana, timah.

ANGGOTA KOMISI VII DPR RI:

Izin usul boleh Pak?

Ya seperti tadi sampaikan Pak Rico, bagaimana kalau kalimatnya itu agar melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap rencana, Pak. Jadi langkah-langkah antisipasi terhadap rencana, jadi kita melakukan antisipasi.

Demikian Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke. Oke, saya kira bagus,

Melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap rencana ya, begitu ya Pak Dirjen, ya?

Oke saya bacakan ya.

F-NASDEM (RICO SIA):

Dirjen Minerba, dan tentunya Dirjen ILMATE.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Oke,

Jadi Komisi VII DPR RI mendesak Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI dan Dirjen ILMATE Kemenperin RI agar melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap rencana pemberlakuan larangan ekspor timah khususnya bagi pelaku usaha yang sudah melakukan investasi hilirisasi pertambangan.

Setuju ya?

Baik,

3. Komisi VII DPR RI bersama Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Dirjen ILMATE Kementerian, Kemenperin RI bersepakat bahwa produk ingot timah merupakan kegiatan hilirisasi timah. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan pengembangan industri lebih hilir. Industri lebih lanjut ya, industri lebih lanjut, industri turunan, pengembangan industri turunan atau lanjut lah industri lanjutan, turunan ya melakukan pengembangan industri turunan agar penyerapan produk ingot timah di, itu dipisah di-nya, di dalam negeri dapat lebih meningkat.



Ada masukan?

DIREKTUR JENDERAL MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Izin Pak Pimpinan,

Kalimat awal bersepakat mengenai ingot adalah hilirisasi nanti bisa mengundang perdebatan dan diskusi panjang juga Pak, karena hilirisasi itu bisa macam-macam penerjemahannya.

Kalau saya cenderung mengusulkan kita tidak perlu mengatakan itu, tapi cukup untuk kita melakukan pengembangan industri turunan sebelum kita melakukan pelarangan bisa seperti itu kalimatnya, Pak Tiifatul mungkin nanti akan lebih produktif.

Demikian, usul saya Pak

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Karena begini Pak Dirjen, untuk sektor nikel misalnya. Feronikel itu pun sudah dikatakan presiden sebagai hilirisasi, jadi ketika ingot timah itu juga pasti merupakan hilirisasi dalam konteks yang sama, seperti itu. Jadi saya pikir *nggak* ada salah dengan kata-kata seperti itu.

DIREKTUR JENDERAL MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Saya hanya mau menghindari nanti akan timbul dampak yang harus kita bahas lagi, ketika misalnya kita sudah ini *kan* sudah dihilirisasi, kenapa kewajiban hilirisasi lagi *gitu*. Padahal kalau hilir kayak di sungai itu bisa sampai muara sampai laut *gitu* Pak, jadi sekarang kita *nggak* punya batasan ya. Saya *nggak* tahu jika Menperin ada batasan *nggak* hilirisasi?

DIRJEN ILMATE KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (TAUFIEK BAWAZIER):

Jadi bagian, bagian yang perlu sebenarnya nanti di dalam lagi hilirisasi.

Nah gitu jadi kemampuan nasionalnya *kan* baru saat ini terpopuler itu, jadi kita punya *skim* nanti tin *chemical*, tin solder, dan sebagainya. Jadi artinya ya sepakat dengan, sebetulnya ini takutnya khawatirnya nanti di *statement* ini menjadi bagian udah cukup di sini *gitu*.

Itu yang mungkin, mungkin narasinya saja sih, maksudnya sama.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Kira-kira kata tambahannya apa Pak, Pak Dirjen kira-kira? Yang mengakomodir kira-kira apa kewaspadaan Bapak tadi.

Apa, bagian dari kegiatan hilirisasi timah, Pak.

Iya betul, jadi merupakan bagian saja Pak secara keseluruhan ya, ya setuju Pak ya?

Baik kalau *gitu* setuju, nomor tiga.

4. Bahwa Komisi VII DPR RI meminta Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI, Dirjen ILAMTE Kemenperin RI, Ketua Asosiasi Ekspor Timah Indonesia, Ketua Asosiasi Industri Timah Indonesia untuk menyampaikan jawaban tertulis terhadap semua pertanyaan pimpinan Anggota Komisi VII DPR RI dan sampaikan paling lambat tanggal 8 Februari 2023.

Setuju Pak ya?

(RAPAT: SETUJU)

Baik,

Baik demikian rapat kita pada sore hari ini, kami persilakan sebelum kami tutup Pak Dirjen Minerba dan Dirjen ILMATE memberikan sambutan penutup ini dalam rangka RDP ya.

Silakan, Pak.

DIREKTUR JENDERAL MINERBA KEMENTERIAN ESDM RI (RIDWAN DJAMALUDDIN):

Baik,

Bapak Pimpinan, serta
Anggota Komisi VII DPR RI yang terhormat,

Kami berterima kasih atas rapat dengar pendapat hari ini, di mana pertama kami menangkap semangat bahwa kita semua menginginkan agar negara mendapat manfaat sebesar-besarnya dari industri pertimahan ini, sehingga diskusi tentang wacana larangan ekspor ini menuju sesuatu yang positif dan kita saling memberikan masukan serta Mengingat untuk memitigasi hal-hal negatif.

Kami sangat menghargai masukan Bapak, Ibu sekaligus dan siap menerima masukan lain dalam rangka menuju optimalisasi dari upaya-upaya kita di industri pertimahan.

Saya mohon maaf atas hal-hal yang kurang.

Terima kasih,

Selamat sore,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Walaikumsalam,

Silakan Pak Dirjen ILMATE.

DIRJEN ILMATE KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN RI (TAUFIEK BAWAZIER):

Baik, terima kasih.

Kami dari Kementerian Perindustrian sangat mengapresiasi Komisi VII dan kami terus bersama untuk meningkatkan nilai tambah daripada semua bahan baku mineral kita, sehingga kita meningkatkan daripada proses hilirisasi untuk kemakmuran sebesar-besarnya buat negara dan masyarakat.

Saya kira itu,

Terima kasih.

KETUA RAPAT (H. EDDY SOEPARNO, S.H., M.H./F-PAN/WAKIL KETUA KOMISI VII DPR RI):

Baik,

Terima kasih,

Ibu-Bapak sekalian
Para Anggota,
Ketua, dan
Pimpinan Anggota Komisi VII,
Pada Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI,
Dirjen ILMATE Kemenprin RI,
Ketum AITI,
Wakil Ketua AETI, dan
Gubernur Babel.

Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini, dan dengan mengucapkan *alhamdulillah* bersama ini Rapat Dengar Pendapat kami nyatakan ditutup.

*Wabillahi Taufik wal Hidayah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

(RAPAT SELESAI PUKUL 16.36 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Dwiyanti, S.Sos.
NIP. 196903131990032002

